

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara, dan mempertimbangkan keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat, isu-isu strategis dan fenomena anomali iklim akhir-akhir ini, maka dengan merujuk kepada Perda No. 12 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, evaluasi pembangunan tahun 2011, dan tahun berjalan 2012, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2013 yang merupakan tahun kelima (tahun terakhir) dari RPJMD 2009-2013, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2013 tetap mengacu kepada Visi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, yakni "Sumatera Utara yang maju dan sejahtera dalam harmoni keberagaman"

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks dibawah ini :

Tabel 4.1.

Hubungan Visi/Misi, Agenda dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No	Visi/Misi	Agenda	Tujuan/Sasaran
	Visi : Sumatera Utara yang maju dan sejahtera dalam harmoni keberagaman		
	Misi-1: Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan	Menciptakan iklim kehidupan dan harmonisasi hubungan masyarakat yang heterogen dalam bingkai NKRI	Terpeliharanya rasa persatuan bangsa dan rasa kebersamaan yang didukung oleh tata kehidupan bermasyarakat yang harnomis.
			Terjalinnnya sikap toleransi antar suku, agama, maupun golongan dalam kehidupan
			Semangat jiwa nasionalisme tanpa mengabaikan semangat kedaerahan
		Melestarikan nilai-nilai kebersamaan (gotong royong) sebagai warga negara sebangsa dan setanah air	Terwujudnya sikap saling menghargai dan rasa saling memiliki dalam proses pembangunan Terciptanya masyarakat dinamis yang menghargai perbedaan dalam mewujudkan pembangunan daerah
		Mendorong pelaksanaan penegakan hukum secara adil dan transparan	Terciptanya masyarakat yang sadar serta taat akan hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat

No	Visi/Misi	Agenda	Tujuan/Sasaran
			Upaya penerapan produk hukum yang adil dan merata disetiap lapisan masyarakat
			Terwujudnya masyarakat yang aman dan rukun
	Misi-2 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan.	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bebas dari kemiskinan, penyakit, kebodohan, dan keterbelakangan Masyarakat yang sejahtera dengan peningkatan kualitas hidup yang layak
		Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia usia produktif	Pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan
			Terwujudnya sumber daya manusia usia produktif yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan persaingan global
		Membangun perekonomian daerah yang diikuti oleh perluasan kesempatan kerja	Tercapainya pengurangan tingkat pengangguran Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan yang konsisten dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Berkembangnya potensi kedaerahan dalam rangka pemerataan serta mengurangi kesenjangan pembangunan
		Membangun prasarana dan sarana daerah secara merata antar wilayah	Terwujudnya prasarana dan sarana daerah yang mampu mendukung pengembangan sektor perekonomian daerah dan pemerataan kesejahteraan antar wilayah Percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal dan penetapan dan perbaikan tapal batas antar wilayah
	Misi-3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman.	Mewujudkan Sumatera Utara yang berilmu dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa	Tumbuhnya minat, bakat dan perhatian masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya nasional maupun daerah Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan mapun potensi kedaerahan
		Mewujudkan masyarakat yang beriman, bermoral, dan bertoleransi tinggi terhadap perbedaan di antara sesama warga	Terciptanya SDM yang berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan

No	Visi/Misi	Agenda	Tujuan/Sasaran
		Mengarahkan keberagaman masyarakat menjadi modal dasar dalam pembangunan	Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah termasuk pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan
		Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan beragama	Terciptanya masyarakat yang bertaqwa dan beriman serta peduli terhadap kegiatan antar sesama agama maupun lintas agama
	Misi-4: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Terciptanya suasana kehidupan yang kondusif bagi upaya pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan ajaran agama, yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama
		Melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam setiap program penyusunan tahap-tahap kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perangkat daerah yang profesional dan berwibawa menuju tata pemerintahan yang baik di dalam kebhinnekaan Sumatera Utara
			Transparansi pemerintahan daerah yang bebas KKN serta karir pegawai dan pengembangan e-government
		Menciptakan rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab bersama terhadap proses pembangunan dan hasil-hasil pembangunan daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan taat hukum dan kehidupan berdemokrasi Pemberdayaan masyarakat maupun pihak swasta dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011, serta perumusan permasalahan dan tantangan tahun 2013, yang telah disajikan pada Bab-II, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Tahun 2009-2013	RKPD Tahun 2012	RKPD Tahun 2013
1. Pemerintahan	1. Pemerintahan	1. Pemerintahan
- Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bermasalah karena dapat menghambat investasi	- Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bermasalah karena dapat menghambat investasi	- Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk merevisi/menarik perda yang berefek negatif terhadap investasi di daerah
- Daya tarik investasi rendah	- Daya tarik investasi rendah	- Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif - Menyederhanakan proses perizinan melalui

		<ul style="list-style-type: none"> peningkatan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Promosi investasi dalam dan luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya implementasi kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya implementasi kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fungsi kelembagaan kerjasama Mendorong terealisasinya beberapa kerjasama antar daerah
2. Sumberdaya Manusia	2. Sumberdaya Manusia	2. Sumberdaya Manusia
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan pokok 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan pokok 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong tersedianya kebutuhan 9 bahan pokok di pasar Peningkatan ketahanan pangan Menciptakan mekanisme pasar yang berdaya saing
<ul style="list-style-type: none"> Pengentasan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengentasan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan angka kemiskinan melalui program kluster 1, 2, 3 dan 4 dan alokasi APBD Prov dan Kab/kota Pemberdayaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Derajat Kesehatan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Derajat Kesehatan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan derajat kesehatan khususnya perbaikan gizi anak dan kesehatan ibu melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pengangguran masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pengangguran masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan kawasan ekonomi baru sebagai penyedia lapangan pekerjaan Pelatihan keterampilan bagi masyarakat melalui BLK
<ul style="list-style-type: none"> Penerapan wajib belajar 12 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan wajib belajar 12 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi sekolah, kesejahteraan guru, beasiswa, penyerapan dana BOS
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan gangguan keamanan/ ketertiban dan penyalahgunaan narkoba 	<ul style="list-style-type: none"> Mengaktifkan fungsi Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara dan Badan Narkotika di Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> Keberagaman suku, adat budaya dan agama 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerukunan antar umat beragama, suku, dan golongan
3. Ekonomi	3. Ekonomi	3. Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> Pertanian : ketersediaan benih, pupuk, pestisida sesuai dengan jumlah, kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat tani, konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, perumahan pemukiman dan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian : ketersediaan benih, pupuk, pestisida sesuai dengan jumlah, kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat tani, konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, perumahan pemukiman dan industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan penangkar benih, Penyediaan pupuk organik Penyediaan pupuk non bersubsidi Pembangunan rumah kompos Peremajaan perkebunan rakyat Mendorong swasembada daging Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional perdesaan dan pasar induk
<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata : pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata : pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan promosi wisata Menjadikan kawasan danau

promosi daerah wisata, penataan informasi daerah tujuan wisata, penataan lokasi obyek-obyek wisata dan infrastruktur pendukung lainnya.	promosi daerah wisata, penataan informasi daerah tujuan wisata, penataan lokasi obyek-obyek wisata dan infrastruktur pendukung lainnya.	toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional - Pengembangan wisata di Kepulauan Nias
- Realisasi pencapaian peningkatan daya beli masyarakat.	- Realisasi pencapaian peningkatan daya beli masyarakat. - Stabilisasi harga untuk menekan inflasi	- Penyiapan lapangan pekerjaan melalui penciptaan lapangan pada berbagai kawasan ekonomi yang strategis (KISM, KIM, Pelabuhan, Bandara. Dsb) - Peningkatan monitoring harga pasar - Pasar murah
4. Sarana dan Prasarana	4. Sarana dan Prasarana	4. Sarana dan Prasarana
- Energi: Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru.	- Energi: Ketersediaan pasokan energi terbarukan dan penggalan sumber energi baru.	- Mendorong ketersediaan energi listrik melalui PLTA, PLTU, PLTMH, PLTS, dan PLTG
- Infrastruktur : Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan, saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.	- Infrastruktur : Kerusakan sarana dan prasarana transportasi, kapasitas bandara dan pelabuhan, saluran irigasi/rawa, jaringan pengairan lainnya, air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai.	- Membangun, memelihara dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan, kereta api, irigasi, Bandar udara, dan pelabuhan, sarana dan prasarana permukiman (air bersih, MCK, sanitasi)
- Realisasi pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).	- Realisasi pemantapan dan efektifitas jalan raya (jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).	- Peningkatan kapasitas jalan nasional/provinsi/kabupaten /kota
- Realisasi pembangunan jalan lingkaran luar (<i>Outer Ring Road</i>) Danau Toba.	- Realisasi pembangunan jalan lingkaran luar (<i>Outer Ring Road</i>) Danau Toba.	- Meningkatkan fungsi jalan lingkaran luar Danau Toba
- Realisasi pembangunan jalan lingkaran strategis di kabupaten/kota.	- Realisasi pembangunan jalan lingkaran strategis di kabupaten/kota.	- Mendorong kabupaten/kota menyelesaikan pembangunan jalan lingkaran perkotaan, dan jalan perkotaan
- Realisasi pengembangan dan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan.	- Realisasi pengembangan dan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan.	- Peningkatan kapasitas pelabuhan Kuala Tanjung, pelabuhan Belawan, dan pelabuhan kolektor lainnya
- Realisasi pembangunan jalan susur pantai timur.	- Realisasi pembangunan jalan susur pantai timur.	- Penyelesaian terrace rencana jalan susur pantai timur Sumatera Utara
- Realisasi pengembangan pelabuhan Belawan dan pelabuhan lainnya	- Realisasi pengembangan pelabuhan Belawan dan pelabuhan lainnya	- pengembangan pelabuhan Belawan
- Realisasi pembangunan Mebidang-Ro	- Realisasi pembangunan Mebidang-Ro	- Mendukung pembangunan jalan tol, arteri,
- Realisasi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi – Junction Kuala Namu	- Realisasi pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi – Junction Kuala Namu	- Peningkatan jalan nasional/provinsi/kabupaten mendukung KISM - Peningkatan jalan provinsi mendukung pariwisata dan sentra produksi

5. Lingkungan Hidup	5. Lingkungan Hidup	5. Lingkungan Hidup
- Kerusakan Mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut	- Kerusakan Mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut	- Kerusakan Mangrove, terumbu karang dan pencemaran perairan laut
- Kerusakan lingkungan TNGL dan DAS Wampu	- Kerusakan lingkungan TNGL dan DAS Wampu	- Kerusakan lingkungan TNGL dan DAS Wampu
- Permasalahan lingkungan sektor tambang	- Permasalahan lingkungan sektor tambang	- Permasalahan lingkungan sektor tambang
- Pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan	- Pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan	- Pencemaran dan kerusakan lingkungan Sungai Deli dan Sungai Belawan
- Pencemaran udara dan limbah B3	- Pencemaran udara dan limbah B3	- Pencemaran udara dan limbah B3
- Pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba.	- Pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba.	- Pencemaran dan kerusakan ekosistem Danau Toba.
6 Tata Ruang/Wilayah	6 Tata Ruang/Wilayah	6 Tata Ruang/Wilayah
- pengendalian tata ruang wilayah dan perencanaan tapal batas wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan kota	- Belum seluruh Kab/Kota memiliki RTRW yang berstatus Perda	- Penyelesaian RTRW Kabuapte/kota
	- Terkendala pembangunan TPA Regional	- Pengendalian pemanfaatan ruang
		- Penyelesaian tata batas provinsi dan kabupaten/ kota
- tapal batas hutan dan pemekaran wilayah.	- Adanya pemekaran kab/kota yang mengubah struktur kewenangan dan batas-batas wilayah pengelolaan penataan ruang untuk mewujudkan RTRW kab/kota	- Pembangunan TPA regional untuk kawasan Mebidangro, Sergei/Tebing Tinggi, dan Tapanuli Tengah
		- Penyelesaian tata batas kehutanan
	- Belum jelasnya tata batas kawasan hutan	- Penegasan tata batas hutan
- Realisasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus	- Kelembagaan dan kapasitas perencana dalam penataan ruang yang masih lemah dalam penyelenggaraan penataan ruang	- Mendorong ketersediaan infrastruktur mendukung KEK Sei Mangkei
	- Belum optimalnya infrastruktur sanitasi dan permukiman (IPAL, air minum, dan drainase)	- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung KISM
	- Kurangnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan/perdesaan di Provinsi Sumatera Utara	- Mengembangkan kawasan strategs nasional Mebidangro terutama penyediaan perumahan dan permukiman
		- Penyediaan air bersih perkotaan
7. Bencana Alam:	7. Bencana Alam:	7. Bencana Alam:
- antisipasi dan peringatan dini tentang bahaya banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan angin	- antisipasi dan peringatan dini tentang bahaya banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan angin	- Antisipasi anomaly iklim melalui penyiapan dan implementasi rencana aksi perubahan iklim (Gas Rumah kaca)

		<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana alam
<ul style="list-style-type: none"> - penanggulangan pasca bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - penanggulangan pasca bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penanggulangan bencana dan dampak pasca bencana
8. Pelayanan Publik	8. Pelayanan Publik	8. Pelayanan Publik
<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan pelayanan publik (<i>Good Governance</i>) yang didukung oleh penegakan hukum yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan pelayanan publik (<i>Good Governance</i>) yang didukung oleh penegakan hukum yang dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. - Pemanfaatan IT untuk peningkatan e-Government 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, e-performance - Peningkatan pemanfaatan IT untuk Sistem perencanaan pembangunan dan aplikasi lainnya untuk mendukung pemerintahan yang baik (e-Government)
9. Pendidikan	9. Pendidikan	9. Pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU tentang kependidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana, sistem) yang menjabarkan UUD 1945 dan UU tentang kependidikan - Peningkatan lama usia sekolah untuk program wajib 12 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pendidikan mulai PAUD s/d Pendidikan tinggi - Menuntaskan kualifikasi guru ke jenjang S1 - Intensifikasi kepada Guru - Dukungan pendidikan kejuruan dan politeknik mendukung KISM dan kawasan industri lainnya - Pemberdayaan dana BOS bagi kabupaten/kota - Peningkatan lama usia sekolah untuk program wajib 12 tahun - Pemberian beasiswa kurang mampu
10. Kesehatan	10. Kesehatan	10. Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan gizi buruk - Pemberdayaan Desa Siaga
	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pengurangan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi balita gizi buruk 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan persalinan - Jaminan kesehatan masyarakat - Pengadaan stock obat2an
11. Ketahanan Pangan	11. Ketahanan Pangan	11. Ketahanan Pangan
<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pencapaian ketahanan pangan (swasembada). 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pencapaian ketahanan pangan (swasembada). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin ketersediaan produksi beras dan pangan lainnya - Pencetakan sawah - Peningkatan penyuluhan pertanian - Gerakan Gema Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Diversifikasi bahan pangan non beras 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sosialisasi penggunaan pangan non beras (manggadong)
	<ul style="list-style-type: none"> - Antisipasi terhadap anomali iklim bumi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bibit - Pengaturan pola tanam
12. Sosial	12. Sosial	12. Sosial
<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara bertahap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara bertahap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan desa sebagai pusat pertumbuhan - Rehabilitasi rumah tidak layak huni - Peningkatan bantuan dan

		perlindungan sosial
13. Isu Strategis Lainnya	13. Isu Strategis Lainnya	13. Isu Strategis Lainnya
- Realisasi program-program pembangunan Kawasan Agropolitan dan Agromarinepolitan	- Realisasi program-program pembangunan Kawasan Agropolitan dan Agromarinepolitan	- Peningkatan fungsi kawasan agropolitan dan agromarine -
- Realisasi pengembangan dan pembangunan kawasan industri di kabupaten/kota	- Realisasi pengembangan dan pembangunan kawasan industri di kabupaten/kota	- Mendukung pengembangan KISM - Membangun kluster industry lainnya -
- Realisasi pengembangan kawasan andalan di Sumatera Utara	- Realisasi pengembangan kawasan andalan di Sumatera Utara	- Pengembangan kawasan Danau Toba, Mebidangro, Kepulauan Nias, dan Pantai Barat Sumatera Utara
- Realisasi peningkatan kerjasama antar lembaga, antar daerah, antar regional, antar strata pemerintahan.	- Realisasi peningkatan kerjasama antar lembaga, antar daerah, antar regional, antar strata pemerintahan.	- Peningkatan perean kerjasama Regional wilayah Sumatera - Kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Daerah dengan Swasta (KPS) - Kerjasama luar negeri (IMT GT dan sister province)
-	- Pengembangan pedesaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatkan akses dan prsarana pedesaan melalui pembangunan jalan produksi, jalan usaha tani, perbaikan irigasi pedesaan - Memberikan nilai tambah ekonomi bagi produksi pangan di pedesaan

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama “Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan terkait dengan isu strategis sumber daya manusia yakni pemenuhan kebutuhan pokok, penerapan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan, penanggulangan pengangguran, penanggulangan gangguan keamanan/ketertiban, penyalahgunaan narkoba dan keberagaman suku, adat budaya dan agama.

Tujuan dan Sasaran Misi Kedua Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan terkait dengan isue strategis terkait dengan sumber daya manusia yakni peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan (guru, siswa, prasarana dan sistem); isue terkait ekonomi yakni pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan), kebutuhan sekunder (wisata), peningkatan daya beli dan stabilisasi harga; isue terkait ketahanan pangan yakni swasembada pangan, diversifikasi bahan pangan dan antisipasi terhadap anomali iklim bumi; isue terkait sarana dan prasarana transportasi, pemenuhan kebutuhan air bersih/pengairan/irigasi, ketersediaan energi, pengendalian bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup dan penataan pemukiman, penanganan masalah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan, pengendalian lingkungan dan pembangunan kawasan ekonomi khusus

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman, terkait dengan isue strategis pelayanan publik (Good Governance) yang didukung oleh penegakan hukum dan dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, realisasi peningkatan kerjasama antar lembaga, antar daerah, antar regional dan antar strata pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran Misi Keempat Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan, terkait dengan isue strategis pemerintahan yakni penanganan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bermasalah dan dapat menghambat investasi, mendorong peningkatan daya tarik investasi melalui keterlibatan pihak swasta dan dunia usaha, dan optimalisasi implementasi kerjasama antar daerah dan pembangunan pedesaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dikaitkan dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 menurut Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

**Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
sesuai dengan Rencana Program Prioritas RPJMD 2009-2013**

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
1.	Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1. Agama	P.1. Mendorong upaya kerukunan antar ummat beragama;	P.1. Mendukung upaya kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
			P.2. Menciptakan suasana kondusif dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat;	P.2. Mendorong upaya kerukunan antar ummat beragama;
			P.3. Mendukung upaya kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;	P.3. Menciptakan suasana kondusif dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
		2. Hukum	P.1. Tumbuh dan berkembangnya kerjasama dalam penegakan hukum.	P.1. Tumbuh dan berkembangnya kerjasama dalam penegakan hukum.
			P.2. Terbangunnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut membangun kesadaran hukum.	P.2. Terbangunnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam turut membangun kesadaran hukum.
			P.3. Terpeliharanya prasarana dan sarana hukum untuk menjamin tegaknya pelaksanaan hukum	P.3. Terpeliharanya prasarana dan sarana hukum untuk menjamin tegaknya pelaksanaan hukum
		3. Pemerintahan Daerah	P.1. Pencabutan Peraturan Daerah yang tidak relevan dengan perkembangan dan paradigma baru, termasuk otonomi daerah.	P.1. Pencabutan Peraturan Daerah yang tidak relevan dengan perkembangan dan paradigma baru, termasuk otonomi daerah.
			P.2. Penerbitan Peraturan Daerah yang baru sebagai sub - sistem dalam sistem hukum nasional.	P.2. Penerbitan Peraturan Daerah yang baru sebagai sub - sistem dalam sistem hukum nasional.

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
			P.3. Penerbitan ketentuan tentang pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi yang diberlakukan di Daerah Provinsi Sumatera Utara.	P.3. Penerbitan ketentuan tentang pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi yang diberlakukan di Daerah Provinsi Sumatera Utara.
		4. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia	P.1. Menumbuhkan apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui tindakan penegakan hukum dan kejahatan terutama yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.	P.1. Menumbuhkan apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui tindakan penegakan hukum dan kejahatan terutama yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.
			P.2. Penanganan masalah KKN, penyalahgunaan narkotika dan obat - obat berbahaya	P.1. Penanganan masalah KKN, penyalahgunaan narkotika dan obat - obat berbahaya
2.	Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Tidak Lapar	1. Pertanian (Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan, Perkebunan, dan Peternakan)	P.1. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi pengembangan cadangan pangan dan ketersediaan energi, protein dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara	P.1. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, dengan kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi pengembangan cadangan pangan dan ketersediaan energi, protein dan diversifikasi bahan pangan dengan sasaran pokok terwujudnya swasembada beras di Sumatera Utara
			P.2. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan lahan pekarangan, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan, lumbung pangan	P.2. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan lahan pekarangan, sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan, lumbung pangan
			P.3. Peningkatan ketersediaan modal, teknologi, bibit benih, pasar bagi kebutuhan petani dan mempermudah akses pasar dan informasi terhadap petani, manajemen LUEP, lumbung pangan	P.3. Peningkatan ketersediaan modal, teknologi, bibit benih, pasar bagi kebutuhan petani dan mempermudah akses pasar dan informasi terhadap petani., manajemen LUEP, lumbung pangan
			P.4. Pengembangan dan pembinaan kemitraan usaha pertanian, bisnis pangan local, industry kuliner, diversifikasi konsumsi, mutu dan keamanan pangan	P.4. Pengembangan dan pembinaan kemitraan usaha pertanian, bisnis pangan local, industry kuliner, diversifikasi konsumsi, mutu dan keamanan pangan
			P.5. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan memaksimalkan pengelolaan hasil peternakan	P.5. Peningkatan populasi dan produksi ternak dengan memaksimalkan pengelolaan hasil peternakan

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
		2. Kelautan dan perikanan	<p>P.1. Pengembangan kesempatan usaha untuk menggali potensi kelautan, dalam menuju sasaran peningkatan taraf hidup dan nelayan serta pendapatan asli daerah</p> <p>P.2. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memaksimalkan pengamanan pulau-pulau terluar di wilayah hukum Sumatera Utara demi terwujudnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan</p> <p>P.3. Pengelolaan terpadu perikanan darat dalam rangka peningkatan gizi masyarakat yang telah menjadi pilihan usaha masyarakat Sumatera Utara</p>	<p>P.1. Pengembangan kesempatan usaha untuk menggali potensi kelautan, dalam menuju sasaran peningkatan taraf hidup dan nelayan serta pendapatan asli daerah</p> <p>P.2. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memaksimalkan pengamanan pulau-pulau terluar di wilayah hukum Sumatera Utara demi terwujudnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan</p> <p>P.3. Pengelolaan terpadu perikanan darat dalam rangka peningkatan gizi masyarakat yang telah menjadi pilihan usaha masyarakat Sumatera Utara</p>
		3. Kehutanan	<p>P.1. Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan, dengan sasaran utama adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah;</p> <p>P.2. Memaksimalkan penghijauan hutan mangrove yang berada di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara.</p> <p>P.3. Menyelaraskan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan guna terwujudnya keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.</p> <p>P.4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan sasaran utama memfasilitasi mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam, dalam rangka melestarikan plasma nutfah pangan.</p> <p>P.5. Mengupayakan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan liar (<i>illegal logging</i>) maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan PAD</p>	<p>P.1. Perlindungan Hutan dan Konservasi Hutan, dengan sasaran utama adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan yang lebih parah;</p> <p>P.2. Memaksimalkan penghijauan hutan mangrove yang berada di pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara.</p> <p>P.3. Menyelaraskan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan guna terwujudnya keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.</p> <p>P.4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan sasaran utama memfasilitasi mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kelestarian sumber daya alam, dalam rangka melestarikan plasma nutfah pangan.</p> <p>P.5. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan hutan suaka dan kawasan hutan lindung</p>

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
			P.6. Perlindungan daerah bawahannya atau fungsi ekologis hutan	
			P.7. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan hutan suaka dan kawasan hutan lindung	
			P.8. Melakukan kebijakan yang ketat dan peraturan-peraturan yang pasti terhadap eksplorasi hasil hutan	
			P.9. Melaksanakan hukum secara pasti terhadap tindakan illegal logging	
3.	Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Tidak Bodoh	1. Pendidikan	P.1. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas dan terjangkau secara ekonomis baik pendidikan formal maupun non formal bagi penduduk miskin, daerah terpencil, kepulauan, serta pada anak penyandang cacat, anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.	P.1. Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan dan keterampilan yang lebih berkualitas dan terjangkau secara ekonomis baik pendidikan formal maupun non formal bagi penduduk miskin, daerah terpencil, kepulauan, serta pada anak penyandang cacat, anak-anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.
			P.2. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik	P.2. Pengembangan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik
			P.3. Mendorong partisipasi segenap komponen masyarakat dalam menjamin ketersediaan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau secara ekonomi.	P.3. Mendorong partisipasi segenap komponen masyarakat dalam menjamin ketersediaan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau secara ekonomi.
			P.4. Menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu melahirkan manusia-manusia mandiri berwirausaha, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan-teknologi, serta berbudaya dan berakhlak mulia.	P.4. Menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu melahirkan manusia-manusia mandiri berwirausaha, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan-teknologi, serta berbudaya dan berakhlak mulia.

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
			P.5. Mendorong dan memberdayakan lembaga pendidikan untuk bersinergi secara tepat guna dalam upaya percepatan pembangunan Sumatera Utara.	P.5. Mendorong dan memberdayakan lembaga pendidikan untuk bersinergi secara tepat guna dalam upaya percepatan pembangunan Sumatera Utara.
			P.6. Memfasilitasi dan menyiapkan beasiswa terseleksi bagi generasi muda Sumatera Utara ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di dalam maupun di luar negeri.	P.6. Memfasilitasi dan menyiapkan beasiswa terseleksi bagi generasi muda Sumatera Utara ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di dalam maupun di luar negeri.
			P.7. Meningkatkan kualitas standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah sehingga setara dengan standar nasional.	P.7. Meningkatkan kualitas standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah sehingga setara dengan standar nasional.
			P.8. Mendorong peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	P.8. Mendorong peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara untuk mengikuti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
			P.9. Pemerataan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif.	P.9. Pemerataan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif.
			P.10. Peningkatan manajemen pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan sekolah yang mampu merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara partisipatif, transparan dan bertanggung jawab	P.10. Peningkatan manajemen pendidikan sebagai upaya untuk menciptakan sekolah yang mampu merencanakan dan melaksanakan program pendidikan secara partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
4.	Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Tidak Sakit	1. Kesehatan	P.1. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan bermartabat dengan membina dan memfasilitasi kemampuan pelayanan puskesmas-puskesmas dan rumah sakit umum daerah	P.1. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan bermartabat dengan membina dan memfasilitasi kemampuan pelayanan puskesmas-puskesmas dan rumah sakit umum daerah

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
			P.2. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.	P.2. Pengembangan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.
			P.3. Menciptakan lingkungan hidup yang berdaya tahan tinggi terhadap penyebaran wabah.	P.3. Menciptakan lingkungan hidup yang berdaya tahan tinggi terhadap penyebaran wabah.
			P.4. Memberdayakan Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Sumatera Utara.	P.4. Memberdayakan Rumah Sakit Umum Provinsi sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Sumatera Utara.
			P.5. Memfasilitasi upaya peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga medis.	P.5. Memfasilitasi upaya peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga medis.
			P.6. Mendorong terciptanya kebijakan penyebaran tenaga medis secara rasional.	P.6. Mendorong terciptanya kebijakan penyebaran tenaga medis secara rasional.
			P.7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dan menggalakkan upaya-upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan media dan forum, peningkatan pola kemitraan pihak lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peningkatan upaya kesehatan swadaya.	P.7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti hidup sehat dan menggalakkan upaya-upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan media dan forum, peningkatan pola kemitraan pihak lintas sektor, swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta peningkatan upaya kesehatan swadaya.
			P.8. Peningkatan upaya pemeliharaan, perlindungan/ kesehatan/ keselamatan kerja, terutama kepada keluarga miskin dan kelompok rentan.	P.8. Peningkatan upaya pemeliharaan, perlindungan/ kesehatan/ keselamatan kerja, terutama kepada keluarga miskin dan kelompok rentan.
			P.9. Peningkatan kesadaran lingkungan sehat di kawasan pariwisata, industri, perumahan dan permukiman serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan.	P.9. Peningkatan kesadaran lingkungan sehat di kawasan pariwisata, industri, perumahan dan permukiman serta perbaikan sarana sanitasi dasar untuk permukiman kumuh dan keluarga miskin di perkotaan maupun di perdesaan.

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
			P.10. Meningkatkan potensi sistem sumber kesehatan melalui partisipasi dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, juga ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan	P.10 Meningkatkan potensi sistem sumber kesehatan melalui partisipasi dan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, juga ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan
5.	Komitmen Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Punya Masa Depan	1. Industri & Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	P.1. Menyelaraskan industri kecil dan rumah tangga dengan industri besar dan pabrikan melalui pembangunan sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan pola kemitraan antara pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran.	P.1. Menyelaraskan industri kecil dan rumah tangga dengan industri besar dan pabrikan melalui pembangunan sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan pola kemitraan antara pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran.
			P.2. Mengembangkan jaringan informasi peluang usaha dalam menampung karakteristik sumberdaya lokal yang berguna.	P.2. Mengembangkan jaringan informasi peluang usaha dalam menampung karakteristik sumberdaya lokal yang berguna.
			P.3. Memantapkan arah dan tujuan koperasi dengan sasaran penguatan dan pertumbuhan UKM sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.	P.3. Memantapkan arah dan tujuan koperasi dengan sasaran penguatan dan pertumbuhan UKM sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.
			P.4. Meningkatkan manejerial di kalangan UKM dalam upaya penguatan modal sebagai industri hilir guna memenuhi kebutuhan industri hulu.	P.4. Meningkatkan manejerial di kalangan UKM dalam upaya penguatan modal sebagai industri hilir guna memenuhi kebutuhan industri hulu.
			P.5. Mendorong terwujudnya kerjasama antara lembaga keuangan dan pelaku UKM di setiap daerah wilayah hukum Sumatera Utara.	P.5. Mendorong terwujudnya kerjasama antara lembaga keuangan dan pelaku UKM di setiap daerah wilayah hukum Sumatera Utara.
6.	Meningkatkan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1. Infrastruktur	P.1. Pembangunan dan peningkatan sarana/prasarana Jalan dan Jembatan	P.1. Pembangunan dan peningkatan sarana/prasarana Jalan dan Jembatan
			P.2. Mendukung Pembangunan dan peningkatan rel kereta api	P.2. Mendukung Pembangunan dan peningkatan rel kereta api
			P.3. Mendukung Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut	P.3. Mendukung Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut

No.	Agenda	Bidang Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD 2009-2013)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2013
			P.4. Mendukung Pembangunan dan peningkatan bandar udara	P.4. Mendukung Pembangunan dan peningkatan bandar udara
			P.5. Pembangunan irigasi	P.5. Pembangunan irigasi
			P.6. Pembangunan pembangkit listrik	P.6. Pembangunan pembangkit listrik
		2. Penataan ruang dan pemukiman	P.1. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan	P.1. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan
			P.2. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat	P.2. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan kumuh menjadi lingkungan yang sehat
			P.3. Pemeliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kegiatan masyarakat maupun ruang publik	P.3. Pemeliharaan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kegiatan masyarakat maupun ruang publik
			P.4. Pengendalian dan penataan ruang terbuka hijau	P.4. Pengendalian dan penataan ruang terbuka hijau
			P.5. Pengembangan sistem pengelolaan dan operasional kebersihan	P.5. Pengembangan sistem pengelolaan dan operasional kebersihan

Berpedoman dari kondisi objektif atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2011 serta perkiraan pada tahun 2012 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas dan juga memperhatikan prioritas sebagaimana Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, diperkirakan masih akan melanjutkan RKP 2012, diantaranya:

1. penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi;
2. percepatan pengurangan kemiskinan;
3. peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
4. peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan
5. implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.

Pada RKP Tahun 2012 sebagai implementasi RPJMN masih tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah. Sinergitas pusat-daerah harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) potensi strategis di setiap wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah (4) rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.

Prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu:

1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;
6. infrastruktur;
7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan bencana;
10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan melalui: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional tahun 2013 tersebut, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah mengalami sinkronisasi sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013
dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2013

No	Prioritas Nasional Tahun 2012	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;	1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2	Pendidikan;	2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
3	Kesehatan;	3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan
4	Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan;	4. Revitalisasi Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis
		5. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
5	Infrastruktur;	6. Peningkatan Infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi
6	Iklim Investasi dan Usaha;	
7	Energi;	
8	Lingkungan Hidup dan Bencana;	
9	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik;	
10	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi;	
11	Prioritas Lainnya:	
	a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;	7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
	b. Bidang Perekonomian;	
	c. Bidang Kesejahteraan Rakyat.	

Sektor-sektor prioritas ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi komitmen pemerintah bersama masyarakat Sumatera Utara untuk mewujudkan Rakyat yang beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Sakit, Rakyat Tidak Bodoh dan Rakyat Punya Masa Depan serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) Daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan menurut hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Disisi lain perlunya sinkronisasi program ini dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran yang mengacu kepada agenda-agenda pembangunan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Daerah Provsu tahun 2009-2013, dengan memfokuskan kepada agenda pembangunan :

1. Menciptakan iklim kehidupan dan harmonisasi hubungan masyarakat yang heterogen dalam bingkai NKRI
2. Melestarikan nilai-nilai kebersamaan (gotong royong) sebagai warga negara sebangsa dan setanah air
3. Mendorong pelaksanaan penegakan hukum secara adil dan transparan
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
5. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia usia produktif

6. Membangun perekonomian daerah yang diikuti oleh perluasan kesempatan kerja
7. Membangun prasarana dan sarana daerah secara merata antar wilayah
8. Mewujudkan Sumatera Utara yang berilmu dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa
9. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bermoral, dan bertoleransi tinggi terhadap perbedaan di antara sesama warga
10. Mengarahkan keberagaman masyarakat menjadi modal dasar dalam pembangunan
11. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan beragama
12. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel
13. Melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam setiap program penyusunan tahap-tahap kegiatan perencanaan pembangunan daerah
14. Menciptakan rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab bersama terhadap proses pembangunan dan hasil-hasil pembangunan daerah
15. Mencari pasar baru (pasar alternative) untuk mendorong peningkatan ekspor seperti Timur Tengah, China dan India dikarenakan Negara-negara tersebut GDP tinggi, pertumbuhan ekonomi relative tinggi, lokasi dekat dan memiliki hubungan baik dengan Indonesia
16. Menyediakan produk yang harganya terjangkau
17. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dan penggunaan produk dalam negeri
18. Mendorong percepatan pembelajaan Pemerintah (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD Prov), Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota) tidak seperti tahun sebelumnya penyerapan terbesar pada triwulan IV dari tahun anggaran berjalan
19. Menjalinkan kemitraan dengan bank untuk pembiayaan ekspor dan pembiayaan/permodalan bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
20. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan merangsang pemilik modal dalam negeri untuk berbisnis
21. Mendorong peningkatan tumbuhnya industry pengolahan Dalam Negeri, sehingga hasil bumi yang di ekspor sudah menjadi produk setengah jadi, bahkan lebih baik lagi menjadi produk jadi sehingga diperoleh *value added* yang lebih besar
22. Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur, lahan pekarangan melalui kegiatan “Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan—GEMA Pangan”.
23. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan program wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun bahkan lebih, beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah
24. Melanjutkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan peningkatan jaring pengaman social bagi penduduk miskin
25. Penyediaan bibit tanaman yang berkualitas yang telah menjadi primadona di Sumatera Utara
26. Pengadaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas masyarakat
27. Pembangunan lanjutan rumah-rumah kompos di semua kabupaten/kota sehingga kelangkaan pupuk secara bertahap bisa diatasi.
28. Pembangunan Kawasan Strategis, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Industri lainnya.
29. Peningkatan pengetahuan SDM UMKM tentang tata cara niaga termasuk prosedur ekspor, fasilitas “lindung nilai valas” dari bank terkait instrument *forward* dan *swap*.
30. Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi
31. Mendorong Percepatan Pembangunan jalan tol dengan mengundang investor lokal atau pembiayaannya melalui dana konsorsium PemrovSU dengan pemkab/pemko se Sumatera Utara
32. Mendorong percepatan penyelesaian Bandara Kuala Namu dan Infrastruktur pendukung lainnya.
33. Mendorong Kabupaten/Kota peningkatan fasilitas utama dan penunjang di seluruh destinasi wisata di seluruh objek wisata potensial dengan menggaet perusahaan local melalui slogan “Perusahaan peduli wisata” kerjasama Pemkab/Pemko dan difasilitasi oleh PemprovSU
34. Mempercepat operasionalnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di provinsi, hal yang sama diikuti juga oleh pemerintah Kabupaten/kota
35. Mendorong peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha untuk pembangunan di segala bidang dengan menerapkan prinsip *business to business*

Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu tetap diupayakan penggalan dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Sumatera Utara, seperti melalui kerjasama Pemerintah dan swasta, sektor dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Komitmen Bina Lingkungan dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah serta dana Luar Negeri.

Sementara sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan fokus pembangunan adalah :

1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Tata Pemerintahan yang Baik dan Keikutsertaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, tata pemerintahan yang baik dan keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

- 1) Terwujudnya kehidupan beragama dan tata pemerintahan yang baik melalui dukungan pelayanan publik, good governance dan clean government
- 2) Meningkatnya disiplin pegawai dan kualitas pelayanan masyarakat
- 3) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat
- 4) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi
- 5) Meningkatnya pelayanan masyarakat, untuk peningkatan daya saing dunia usaha

2. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terjangkau khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan dengan mengacu kepada PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga diharapkan perlu dibangun kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga dilahirkan suatu kesepakatan pembangunan yang masing-masing tingkatan pemerintah melaksanakan pembangunan yang terfokus dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan dari hasil kesepakatan dimaksud, sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian pada masing-masing tingkatan pemerintahan tidak akan ada lagi pelaksanaan kegiatan dengan kesamaan maksud dan tujuan.

a. Pendidikan

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan pada tahun 2013 adalah :

- 1). Terlaksananya pendidikan wajib belajar 12 tahun
- 2). Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 99% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 7-18 tahun sebesar 95 dengan rata-rata lama sekolah 10,07 tahun.
- 3). Berkurangnya persentase penduduk buta aksara menjadi 1,54 %
- 4). Peningkatan kualitas guru ke jenjang yang lebih tinggi khususnya yang belum strata I.
- 5). Peningkatan kualitas guru sekolah menengah dari S-1 menjadi S-2
- 6). Peningkatan APK SD+MI menjadi 112,59 dan APM SD+MI menjadi 92,66
- 7). Peningkatan APK SMP+MTS menjadi 105,01 dan APM SMP+MTS menjadi 97,52
- 8). Peningkatan APK SMA+MA+SMK menjadi 89,99 dan APM SMA menjadi 74,57
- 9). Peningkatan APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 10) Peningkatan Kesejahteraan Guru.
- 11) Peningkatan kuantitas dan kualitas SMK berbasis lokal dan industri unggulan

b. Kesehatan

Adapun sasaran peningkatan kualitas kesehatan meliputi :

- 1). Meningkatnya Usia Harapan Hidup menjadi 71,3 tahun
- 2). Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 22/1.000 kelahiran hidup
- 3). Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 275/100.000 kelahiran hidup.
- 4). Menurunnya prevalensi gizi buruk dan kurang menjadi 20%.
- 5). Meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin melalui pemberian subsidi terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta upaya jaminan pemeliharaan kesehatan (Jamkesda dan Jampersal)
- 6). Meningkatkan upaya lingkungan sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan.
- 7). Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

3. Peningkatan kualitas Infrastruktur mendukung pembangunan Ekonomi

Kebijakan pembangunan jalan dan jembatan di provinsi sumatera utara khususnya pembangunan jalan status provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat kesetaraan pembangunan antara wilayah agar dapat berkembang secara pesat dengan membuat kebijakan penanganan sebagai berikut :

- Meningkatkan ruas jalan provinsi yang berada di pantai barat, pantai timur maupun dataran tinggi.
- Meningkatkan ruas jalan menuju daerah pariwisata
- Membangun jalan akses menuju sentra produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan) yang berpotensi untuk pengembangan industri
- Membangun jalan penghubung antara jalan nasional, maupun jalan provinsi.
- Memelihara ruas jalan / jembatan yang sudah cukup baik.
- Membuka daerah terbelakang dan terisolir.
- Membangun jembatan standard kelas jalan yang ada.
- Memelihara kondisi jalan yang baik dan melakukan peningkatan jalan untuk kondisi jalan yang rusak secara bertahap.

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas pembangunan infrastruktur pendukung pembangunan Ekonomi adalah :

3.1. Program pembangunan prasarana jalan diarahkan kepada sasaran:

- 1) Meningkatnya daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama pada Kawasan Andalan, Pariwisata atau daerah yang cepat berkembang serta jalan Lintas Timur, Tengah, Barat dan Feeder Road
- 2) Meningkatnya aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan
- 3) Meningkatnya partisipasi BUMN, BUMD maupun Swasta dalam penyelenggaraan prasarana jalan termasuk pembangunan jalan Toll dan infrastruktur lainnya.

3.2. Prasarana Irigasi

Program pembangunan irigasi diarahkan kepada :

- 1) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 2) Penyediaan dan pengelolaan air baku
- 3) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
- 4) Pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai
- 5) Pembinaan, pengaturan dan perencanaan pengembangan sumber daya air

Pembangunan diarahkan kepada sasaran :

- 1) Pemeliharaan irigasi (rutin tiap tahun), seluas 73,326 Ha
- 2) Perbaikan/Peningkatan irigasi seluas 5,000 Ha
- 3) Pemeliharaan rawa (tutin tiap tahun) seluas 61,732 Ha
- 4) Perbaikan/ Peningkatan rawa seluas 3,500 Ha
- 5) Perkuatan Tebing sungai sepanjang 5,500 m
- 6) Normalisasi/Pelurusan sungai sepanjang 9,500 m
- 7) Pembangunan/perbaikan tanggul sepanjang 10,250 m
- 8) Penyediaan air baku/embung 4 unit

3.3. Prasarana Ketenagalistrikan

Pembangunan dibidang penyediaan energi listrik diarahkan kepada penyelesaian proyek yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2013, yakni PLTU Sumut I dan II di Pangkalan Susu sebesar 2 x 200 MW.

4. Pembangunan pertanian berkelanjutan dan penguatan sistem ketahanan pangan

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas Penguatan Pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan diarahkan terutama peningkatan produksi pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan masing-masing sasaran yakni :

- a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 5%, diarahkan kepada :
 - 1). Ketersediaan beras mencapai 2,209,782 ton, dengan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 3,901,761 ton
 - 2). Luas panen padi mencapai 867,428 hektar dari luas tanam yang ditargetkan 885,131 Hektar
 - 3). Produktifitas padi mencapai 44.98 kwintal/hektar
 - 4). Produksi jagung mencapai 1,091,173 ton

- 5). Luas panen jagung mencapai 288,536 hektar dari luas tanam yang ditargetkan 294,424 hektar
 - 6). Produktifitas jagung mencapai 37.82 kwintal/hektar
 - 7). Produksi kedelai mencapai 46.138 ton
 - 8). Luas panen kedelai mencapai 51,950 hektar dari luas tanam yang ditargetkan 44,100 hektar
 - 9). Produktifitas kedelai mencapai 11.78 kwintal/hektar.
- b. Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 7%, yang diarahkan kepada tercapainya :
- 1). Luas areal perkebunan Sumatera Utara mencapai 1.922.258,34 hektar.
 - 2). Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 17.323.879,09 ton.
 - 3). Penanaman areal tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat dengan peremajaan seluas 15.000 Ha
 - 4). Produksi gula 72,285 ton dengan luas panen 13,209 Ha
- c. Peternakan, diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan daging, telur dan susu, yakni :
- 1) Produksi daging meningkat sebesar 4,5 % menjadi 140.730,29 ton.
 - 2) Produksi telur meningkat sebesar 4,5 % menjadi 103.455 ton
 - 3) Peningkatan populasi sapi potong sebesar 5 % menjadi 467.253 Ekor
 - 4) Meningkatnya jumlah akseptor IB 5 % menjadi sebanyak 58.800 ekor.
 - 5) Meningkatnya produksi BIBD sebesar 20 % menjadi 52.500 dosis
 - 6) Meningkatnya tingkat kelahiran hasil Inseminasi Buatan sebesar 10 % menjadi 41.250 Ekor
 - 7) Penyediaan Potensial Stok Sapi Potong sebanyak 86,697 ekor.
 - 8) Penyediaan daging sapi sebesar 16,640 ton.
 - 9) Vaksinasi rabies pada anjing sebanyak 200.000 ekor dalam rangka Sumatera Utara bebas rabies pada tahun 2015
 - 10) Vaksinasi Hog Cholera pada babi sebanyak 50.000 ekor dalam rangka pengendalian Penyakit Hog Cholera.
 - 11) Vaksinasi Septicemia Ephizotica (SE) sebanyak 50.000 ekor dalam rangka pengendalian Penyakit SE.
 - 12) Meningkatkan biosekuriti untuk pengendalian Flu Burung
 - 13) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan (ASUH)
 - 14) Terkendalinya dan terbebasnya penyakit hewan menular strategis (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza) dan penyakit lainnya.
 - 15) Meningkatkan populasi, produktivitas dan produksi susu, sehingga impor bisa dikurangi
 - 16) Pengembangan kelompok usaha pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing sebanyak 20 Kelompok
 - 17) Penurunan prevalensi dan atau insiden zoonosis sebesar 5 %
- d. Perikanan dan Kelautan, diarahkan kepada tercapainya :
- 1). Peningkatan produksi perikanan mencapai 581,192,19 ton
 - 2). Peningkatan ekspor hasil perikanan mencapai 77.622,94 ton
 - 3). Peningkatan konsumsi ikan perkapita sebesar 36,98 kg/kap/tahun

4. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan kualitas Kesejahteraan Rakyat Miskin

Adapun sasaran prioritas pembangunan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10-15% per tahun
- 2) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10%/tahun
- 3) Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya pada 30 KUKM
- 4) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi pada 1.200 koperasi
- 5) Pemberdayaan usaha mikro dan menengah pada 250.000 UMKM
- 6) Terbinanya koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinpolitan di 10 KUKM.
- 7) Pembentukan Koperasi Primer sebanyak 200 unit
- 8) Terbinanya UMKM dalam sentra sebanyak 300 UMKM.
- 9) Optimalisasi rumah produktifitas daerah sebanyak 1000 orang bagi sarjana yang belum bekerja

Selain hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih akan terus menggalakkan pembangunan wilayah yang berbasis kepada pedesaan.

Adapun program yang akan dilaksanakan tersebut antara lain adalah :

1. Desa Vokasi

Desa vokasi merupakan wujud implementasi program Pendidikan Kecakapan Hidup dalam spektrum pedesaan. dengan maksud untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan pemanfaatan potensi lokal. Melalui desa vokasi ini diharapkan warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

Program ini dilaksanakan pada 33 Kabupaten/Kota dengan kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat dengan pemanfaatan potensi lokal daerah dan pemberian stimulan.

2. Desa Siaga Kesehatan

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

Konsep Desa Siaga yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu hidup sehat itu harus berkesinambungan dan menjadi bagian dari warga desa tersebut. Di desa siaga minimal harus ada pos kesehatan masyarakat yang dilayani satu bidan dan dua kader kesehatan. Di tempat ini masyarakat setidaknya bisa mendapat layanan kesehatan dasar. Hal ini akan dapat berjalan baik jika dilakukan konsep kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota berupa sharing dana untuk pemberhasilan program Desa Siaga Kesehatan yang telah dicanagkan Pemerintah ini.

Program ini dilaksanakan di 33 Kabupaten/Kota dengan kegiatan pelatihan yang melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan kader kesehatan.

3. Desa Mandiri Pangan

Desa sebagai unit produksi khususnya sektor pertanian mempunyai peranan penting sebagai penyangga daerah perkotaan. Keberhasilan pembangunan desa yang belum optimal perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, akademisi maupun masyarakat setempat. Sebagai daerah penyangga khususnya komoditi pangan, agar keamanan dan ketahanan pangan bagi masyarakat maka pemerintah merencanakan suatu program yaitu Desa Mandiri Pangan. Masyarakat pedesaan pada umumnya tidak atau kurang memahami apa tujuan yang diharapkan dari program yang direncanakan.

Pengertian Desa Mandiri Pangan adalah Kemampuan (pengelolaan) suatu desa untuk menjamin kebutuhan pangan rumah tangga di desanya, sesuai dengan preferensi dan kemampuan sumberdaya (alam, SDM) yang dimiliki, tanpa adanya tekanan dan ketergantungan dari pihak luar, masyarakat desa tidak hanya sebagai penonton, tetapi mereka harus aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta menikmati hasil.

Diharapkan di Sumatera Utara akan dapat didata dan diaplikasi program Desa Mandiri Pangan dalam rangka terus meningkatkan ketahanan pangan yang telah diraih selama ini dan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya.

Pada tahun 2013 diprogramkan peningkatan kemampuan masyarakat di 150 desa dengan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan tidur dan pembinaan petani melalui penyuluhan.

4. Desa Tertinggal, Pesisir, Pulau – Pulau terluar/terdepan.

Mengingat peran penting desa tersebut dalam pembangunan nasional ditinjau dari segi ekonomi maupun ketahanan nasional terutama desa yang berada di daerah perbatasan atau wilayah pesisir, maka diperlukan program Pengembangan Desa Tertinggal, Pesisir dan Pulau – Pulau terluar/terdepan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satunya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Pesisir.

5. Desa Gardu Nangkis

Untuk percepatan pengentasan kantong-kantong kemiskinan di Sumatera Utara, maka program gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan atau lebih dikenal dengan program GARDU NAGKIS, akan diterapkan pada tahun 2012 dengan sasaran adalah desa miskin.

Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota akan menjadi pelaksana dari program ini dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan di Sumatera Utara, sebagaimana target pencapaian pembangunan millenium (MDG's) tahun 2015 menjadi 7%.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dalam mendukung peningkatan produktifitas desa, pemberian pengobatan secara gratis bagi masyarakat miskin, penguatan peran aparat pemerintah dalam pembangunan masyarakat.

6. Program Keluarga Harapan

Program ini bertujuan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga keluarga sangat miskin dalam jangka pendek. Dan PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Kewajiban (*conditionalities*) yang harus dilaksanakan oleh rumah tangga sangat miskin peserta PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kewajiban berkaitan dengan upaya peningkatan status kesehatan Ibu hamil dan anak, serta tingkat pendidikan anak dari keluarga rumah tangga sangat miskin.

Kemudian daripada itu beberapa program prioritas terkait dengan percepatan pengurangan angka kemiskinan, sesuai dengan Four Track Strategi yang dituangkan dalam RKP Tahun 2012, yang dilaksanakan melalui 3 Klaster yang telah berjalan selama ini yakni :

Klaster I : Bantuan Sosial Berbasis Keluarga dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) : antara lain (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (2) Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), (3) Program Keluarga Harapan (PKH), (4) Bantuan RASKIN, (5) Bantuan Sosial, (6) Bantuan Bencana alam,

Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat, melalui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Klaster III : Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR); serta

Pengembangan Kluster IV yang diarahkan kepada peningkatan dan perluasan program pro-rakyat melalui :

- 1) Program rumah sangat murah
- 2) Program kendaraan angkutan umum murah
- 3) Program air bersih untuk rakyat
- 4) Program listrik murah & hemat
- 5) Program peningkatan kehidupan nelayan
- 6) Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan

Adapun sasaran secara makro untuk keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dari sisi ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Sasaran Makro Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2013
1	PDRB ADHB	Triliun Rp	389,39
2	PDRB ADHK 2000	Triliun Rp	145,04
3	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	28,19
4	PDRB Perkapita ADHK 2000	Juta Rp	10,26
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,98
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	104,27
7	Volume Ekspor	Juta Ton	6,17

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2013
8	Nilai Ekspor	Milyar US\$	8,99
9	Volume Impor	Juta ton	6,17
10	Nilai Impor	Milyar US\$	3,06
11	Tingkat Inflasi	Persen	6,00

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tersebut diatas memerlukan dukungan dari Kab/Kota untuk keberhasilan sasaran tersebut dengan kontribusi sebagai berikut :

Tabel 4.8.
Proyeksi Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi per-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2013

KAB/KOTA	SEKTOR LAPANGAN USAHA									PDRB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kab. Nias	4,87	9,52	5,20	5,18	9,20	5,28	13,30	7,03	8,61	6,94
Kab. Mandailing Natal	6,14	7,30	3,70	1,57	12,09	5,50	11,42	9,12	5,38	7,08
Kab. Tapanuli Selatan	6,51	11,64	3,58	9,36	11,28	7,76	14,02	11,52	8,99	6,38
Kab. Tapanuli Tengah	5,07	9,13	3,40	6,51	11,28	7,43	14,73	9,59	9,26	6,93
Kab. Tapanuli Utara	4,55	5,67	8,55	10,58	9,12	6,30	5,87	3,08	12,48	6,80
Kab. Toba Samosir	5,48	10,85	5,67	7,42	10,03	5,92	13,34	9,20	9,88	6,71
Kab. Labuhan Batu	6,43	10,13	4,04	5,12	8,77	9,78	14,72	10,35	8,17	6,63
Kab. Asahan	5,73	8,23	4,07	6,80	12,42	8,54	14,40	11,88	9,26	6,82
Kab. Simalungun	5,77	7,59	2,89	10,55	8,87	8,66	14,44	13,67	9,87	6,80
Kab. Dairi	4,64	8,06	4,13	6,92	8,44	10,45	13,59	9,60	8,32	6,58
Kab. Karo	5,38	11,14	3,45	4,96	8,93	7,78	12,55	8,34	9,68	7,33
Kab. Deli Serdang	7,17	7,20	5,26	7,74	10,46	5,43	8,95	7,94	8,22	6,41
Kab. Langkat	6,97	2,01	6,13	5,27	14,14	7,36	8,41	14,58	8,02	7,12
Kab. Nias Selatan	5,33	10,07	4,90	8,70	10,87	4,72	13,20	7,42	8,90	7,14
Kab. Humbang Hasundutan	3,94	12,48	6,61	9,26	12,87	8,66	15,48	11,07	9,04	7,09
Kab. Pakpak Bharat	5,38	9,42	2,70	8,61	12,28	5,45	14,86	9,33	8,23	6,91
Kab. Samosir	6,37	8,60	2,99	10,87	11,59	4,44	10,92	7,66	9,66	6,98
Kab. Serdang Bedagai	5,84	13,97	4,40	10,11	12,09	5,22	14,20	10,66	8,72	7,05
Kab. Batu Bara	7,32	12,60	5,97	6,20	12,23	6,10	14,49	12,00	10,29	6,82
Kota Sibolga	4,71	7,74	4,81	2,66	8,48	6,02	9,45	10,51	8,08	7,20
Kota Tanjung Balai	5,80	8,59	4,77	7,24	9,97	5,79	11,76	10,33	8,25	7,28
Kota Pematang Siantar	2,75	6,99	4,86	4,68	6,87	5,23	9,92	7,66	8,10	6,92
Kota Tebing Tinggi	2,71	6,10	3,19	3,47	6,47	5,03	10,52	8,35	7,39	6,93
Kota Medan	2,95	10,25	2,81	3,89	8,07	6,18	9,78	8,99	7,58	7,35
Kota Binjai	4,69	12,88	2,29	5,55	8,30	7,15	9,65	8,24	8,38	7,30
Kota Padang Sidempuan	4,95	10,42	4,19	9,83	9,45	4,73	9,46	9,07	8,93	7,12
Kab. Palas	6,16	9,99	3,52	8,07	10,09	5,46	12,08	10,67	8,06	6,95
Kab. Paluta	6,32	9,81	3,28	7,65	9,91	5,20	13,09	10,16	8,47	6,98
Jumlah PDRB Kabupaten	5,94	7,68	4,46	5,38	9,24	6,55	10,50	9,17	8,38	6,98
PDRB Propinsi	5,94	7,68	4,46	5,38	9,24	6,55	10,50	9,17	8,38	6,98

Sedangkan sasaran Makro Sosial yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Sasaran Makro Sosial
Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2013

NO	INDIKATOR	KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2013
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,00
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,07
3	Tingkat Melek Huruf (%)	98,46
4	Indeks Pembangunan Manusia	82,00
5	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,30
6	Total Fertility Rate (TFR)	2,12
7	Infant Mortality Rate (IMR)	20,94
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,60

4.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Untuk mengimplementasikan dan memberhasikan sasaran/target dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 yaitu :

- 1) Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
- 2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
- 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
- 4) Peningkatan Infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi;
- 5) Revitalisasi Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis;
- 6) Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- 7) Perluasan kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dituangkan kedalam program dan kegiatan prioritas yang dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Program/Kegiatan Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang direncanakan untuk mendukung Prioritas Pembangunan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 Lanjutan Pembangunan Islamic Center	Terbangunnya sarana pendukung keagamaan	25%	- Dinas Tarukim
		2 Pemanfaatan ICT untuk perencanaan pembangunan	Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (e-Planning) Diterapkannya e-procurement terhadap pengadaan barang dan jasa pada lingkungan pemerintahan 33 Kab/kota se-Sumatera Utara	1 Sistem	- Bappeda
		2 Peningkatan implementasi e-Procurement untuk pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan kab/kota	Melaksanakan pemberian informasi yang terbuka dan tidak berjarak dengan masyarakat (akses informasi yang dapat dijangkau luas).	33 Kab/Kota	- Biro Pembangun an
		3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	1 Kegiatan	- Dinas Komunikasi dan Informatika;
		4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	33 Kab/kota	- Bapemas
		5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya kemampuan pelayanan aparat desa	33 Kab/kota	- Biro Pemerin tahan
		6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kerjasama antar kabupaten/kota dan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi se-Sumatera dan Provinsi lainnya	33 Kab/kota	- Biro Pemerin tahan
		7 Peningkatan kerjasama antar daerah	Meningkatnya kerjasama dengan negara lainnya khususnya di ASEAN, IMT-GT dan Sister Province	33 Kab/Kota 10 Provinsi	- Biro Otda dan Kerjasama
		8 Peningkatan hubungan kerjasama luar negeri	Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat, peningkatan derajat ekonomi, pendidikan dan kesehatan	ASEAN, IMT-GT dan Sister Province	- Biro Otda dan Kerjasama
9 Bantuan sosial dan hibah kepada elemen/organisasi masyarakat/keagamaan/pendidikan dan kesehatan			- Biro Binsos		
2.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan				
		Pendidikan			
		1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya sarana dan prasarana	60%	Dinas Pendidikan
			Optimalisasi pemanfaatan fasilitas	70%	
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran	80%	
			Subsidi <i>Block Grand</i> dan imbal swadaya (dana <i>sharing</i>)	12%	
	Sosialisasi dan pemasyarakatan PAUD	75%			
	Tersedianya data dan informasi yang memadai	75%			

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	K I N E R J A		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			tentang Pendidikan Anak Usia Dini		
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemerataan dan peningkatan mutu SD/MI, SLB dan SMP/MTs	90%	
			Beasiswa, subsidi, <i>Block Grand</i> , imbal swadaya	18%	
			Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	60%	
			Revitalisasi serta penggabungan (satu atap) sekolah-sekolah terutama SD/MI, SMP/MTs	10%	
			Pemantapan akreditasi sekolah	30%	
			Pendirian sekolah sesuai kebutuhan wilayah	1 per wilayah	
			Penyediaan layanan alternatif pendidikan dasar, khususnya bagi masyarakat miskin, terpinggirkan, berpindah-pindah, anak putus sekolah	40%	
			Penanganan putus sekolah dan yang tidak melanjutkan serta bimbingan bagi yang kesulitan	45%	
			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas	50%	
			Pembinaan sekolah terpadu, pendidikan khusus dan pendididkan layanan khusus	35%	
			Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan	80%	
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional	50%	
			Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	40%	
			Tersedianya informasi elektronik melalui website	50%	
			Pengembangan standar pengelolaan pendidikan	50%	
			Peningkatan jumlah guru kontrak ke sekolah-sekolah sesuai bidang studinya	20%	
			Peningkatan sekolah-sekolah yang layak digabungkan	15%	
			Penambahan kurikulum sekolah dengan muatan lokal dan sejarah kebudayaan	50%	
		3 Program Pendidikan Menengah	Penyediaan beasiswa, subsidi, <i>Block Grand</i> , imbal swadaya (dana <i>sharing</i>)	12%	
			Pelayanan pendidikan alternatif	50%	
			Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	60%	
			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas	40%	
			Pemantapan akreditasi sekolah	20%	
			Pengembangan sekolah bertaraf internasional	50%	
			Pembangunan SMK berkeunggulan lokal untuk mendukung pengembangan cluster industri	50%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Perluasan akses dan peningkatan jumlah SMK	50%	
			Pengembangan SMK sebagai Pusat Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT) dan <i>Community College</i> atau Carier Center	30%	
			Penerapan dan penyesuaian kurikulum yang berbasis kompetensi pada sekolah menengah dan kejuruan	70%	
			Kerjasama dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah-sekolah	40%	
			Membangun dan merahabilitasi sekolah dengan prasarana yang memadai (SMU, SMK dan MA) termasuk sarana olahraga	70%	
		4	Program Pendidikan Non Formal		
			Pembelajaran keaksaraan fungsional	40%	
			Penyediaan sarana dan prasarana	50%	
			Penataan lembaga pendidikan nonformal	50%	
			Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)	30%	
			Beasiswa magang, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	60%	
			Meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan, kualitas dan kuantitas warga masyarakat belajar kejar paket A dan B yang setara SD dan SLTP	50%	
			Mengembangkan model pembelajaran untuk program pendidikan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan	50%	
			Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya termasuk budaya ilmiah, kreasi sastra dan seni		
		5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			Penyediaan fasilitas pelaksanaan sertifikasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60%	
			Pembentukan dan pembinaan forum kepala sekolah	70%	
			Pengembangan SDM Diklat	20%	
			Pengembangan standarisasi SDM Diklat	40%	
			Pengembangan model Tenaga Kependidikan pada Pendidikan layanan khusus	45%	
			Penyiapan guru untuk pemenuhan kualifikasi dan uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan renumerasi	50%	
			Pengembangan sistem pengelolaan manajemen	50%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	K I N E R J A		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			tenaga kependidikan		
			Penggalangan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan sertifikasi profesi pendidik dan standarisasi	40%	
			Pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pembelajaran dan profesionalisme	35%	
			Peningkatan kesejahteraan bagi guru di kawasan terpencil	40%	
			Pengembangan model-model pembelajaran, bahan ajar multi media	25%	
			Peningkatan manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis kompetensi (MBK)	45%	
			Pengembangan sistem rekrutmen Tenaga Kependidikan	80%	
			Pengembangan sistem manajemen pendidikan	60%	
			Pengembangan sistem pembinaan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal	70%	
			Pelatihan untuk Pelatih KTSP bagi guru mata pelajaran SD, SMP, SMA dan SMK	50%	
			Meningkatkan penyediaan buku, alat peraga, perpustakaan dan laboratorium	35%	
			Peningkatan kualitas SDM guru ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan kursus-kursus lainnya	30%	
			Kemitraan dengan lembaga Pendidikan Tendik	30%	
			Revitalisasi peran dewan pendidikan dan komite sekolah	50%	
			Beasiswa Program S1 bagi guru SD, SMP, SMA dan SMK	24%	
			Peningkatan Diklat Profesionalisme Guru TK, SLB, SD, SMP, SMA dan SMK	40%	
			Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Guru SLB	30%	
			Sosialisasi dan Asistensi implementasi penilaian kinerja sekolah SD, SMP, SMA dan SMK	70%	
			Diklat dan Pembinaan kompetensi Calon Kepala Sekolah/Pengawas dan Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah	50%	
			Pembinaan KKG SD dan MGMP/D SMP, SMA dan SMK melalui gugus dan sanggar kegiatan belajar	50%	
		6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan tata kelola pendidikan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	30%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD	
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			Peningkatan kualitas dan efisiensi manajemen data melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	40%		
			Penyusunan Rencana Program Pembangunan secara terpadu dalam bidang pendidikan	70%		
			Pengembangan sistem manajemen operasional menuju standarisasi dan jaminan mutu (<i>quality assurance</i>)	40%		
			Peningkatna sistem Assesmen, Monitoring dan Evaluasi program pembangunan pendidikan	40%		
			Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan	30%		
			Pendataan dan pemetaan pendidikan	70%		
			Monitoring dan evaluasi program pembangunan pendidikan	40%		
			Pelatihan untuk peningkatan kemampuan perencanaan, penganggaran dan monev bagi kepala sekolah	30%		
			Peningkatan kerjasama dan sinkronisasi program Kemendiknas, Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota	70%		
			Peningkatan pemahaman UU, PP, dan kebijakan-kebijakan Kemendiknas dan Disdik Provinsi	75%		
			Pengkajian tentang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan	53%		
		7	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	Pengembangan politeknik berdasarkan keunggulan lokal	30%	
3.	Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan					
	Kesehatan	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya cakupan rawat jalan penduduk	14.50%	Dinas Kesehatan
				Tercapainya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	88%	
				Tercapainya cakupan pelayanan :		
				- antenatal (K4)	94%	
				- cakupan kunjungan neonatus (KN2)	92.50%	
				- cakupan kunjungan bayi	95%	
				Tercapainya persentase Gakin yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas	90%	
				Tercapainya cakupan peserta yang mendapatkan	67%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pelayanan kesehatan kerja		
			Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan PONEB	55%	
			Setiap kabupaten/Kota memiliki minimal 2 puskesmas santun usaha	54 puskesmas	
			Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	55.00%	
			Terbentuknya puskesmas mampu PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	55.00%	
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	12.00%	
			Setiap kab/kota memiliki 3 puskesmas yang melaksanakan program kesehatan olahraga	26 KK	
			Tercapainya persentase pemeriksaan laboratorium klinis	95%	
			Tercapainya persentase pemeriksaan laboratorium masyarakat	90%	
			Jumlah penduduk kurang mampu yang mendapatkan operasi katarak gratis	1.000 mata	
			Jumlah penduduk kurang mampu yang mendapatkan pemeriksaan THT gratis	350 orang	
			Persentase anak sekolah yang mendapatkan pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran	8%	
			Persentase pasien kusta yang mendapatkan pelayanan dan peralatan rumah tangga	100%	
			Persentase pasien TB yang mendapatkan pelayanan	100%	
			Persentase pasien TB yang mendapatkan makanan tambahan	100%	
			Jumlah diklat tenaga kesehatan yang dilaksanakan di PTC Indra Pura	5 diklat/thn	
		2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tercapainya persentase sarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan memenuhi GMP	4%	
			Tercapainya persentase sarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan memenuhi GDP	4%	
			Tercapainya persentase label iklan/promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan memenuhi persyaratan	4%	
			Tercapainya persentase penggunaan obat	95%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			esensial generik di sarana pelayanan kesehatan		
			Tercapainya persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotik dan puskesmas	80%	
			Tercapainya anggaran obat per kapita di sarana pelayanan kesehatan dasar	Rp.9.000,-/ kapita	
			Tercapainya persentase ketersediaan obat TB	100%	
			Tercapainya persentase ketersediaan obat Kusta	100%	
			Tercapainya persentase obat rasional di sarana pelayanan kesehatan	60%	
		3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	62%	
			Tercapainya persentase Posyandu Purnama & Mandiri	48%	
			Tersedianya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Siaga	100%	
			Tercapainya persentase desa siaga aktif	15%	
			Meningkatnya jumlah pengobatan tradisional yang dibina	45%	
			Tercapainya persentase puskesmas yang memiliki TOGA	20%	
			Tercapainya persentase puskesmas yang menyelenggarakan pengobatan tradisional	8%	
			Tercapainya persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan	20%	
			Terlaksananya peringatan hari-hari besar kesehatan		
			Setiap kab/kota memiliki SK Saka Bhakti Husada (SBH)	26 KK	
		4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pesantren yang memiliki poskestren	35%	
			Tercapainya persentase keluarga memenuhi rumah yang memenuhi syarat kesehatan	75%	
			Tercapainya persentase keluarga menggunakan air bersih	75%	
			Tercapainya persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan	75%	
			Tercapainya persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	88%	
			Tercapainya persentase Kab/Kota Sehat	45%	
		5. Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan rawat inap	1,42	
			Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat	85%	
			Jumlah rumah sakit yang melaksanakan	63.75%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergeni Komprehensif (PONEK)		
			Tercapainya persentase rumah sakit yang terakreditasi	30%	
			Tercapainya persentase rumah sakit umum daerah menjadi BLUD	50%	
			Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi Gakin di kelas III rumah sakit	100%	
			Tercapainya penurunan persentase penemuan kasus jiwa di masyarakat	17%	
			Tercapainya persentase penemuan kasus kebutaan di masyarakat	1.2%	
		6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Persentase desa yang mencapai <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	95%	
			Angka Case Detection Rate penyakit TB	85%	
			Angka keberhasilan pengobatan TB	95%	
			Angka Acute Flaccid (AFP) pada anak usia kurang dari 15 tahun	>2/100.000	
			Penderita malaria diobati	95%	
			Penderita DBD diobati	98%	
			ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ART	90%	
			Angka penemuan Kasus Baru Frambusia	0,8 per 100.000 penduduk	
			Angka penemuan Kasus Baru Kusta	10% pddk/thn	
			Penyelidikan Epidemiologi KLB < 24 jam	100%	
			Persentase Angka Kematian Jemaah Haji	2,15/1.000 jh	
			Terlaksananya Surveilans Epidemiologi, Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular	40% penduduk	
			Jumlah Kab/Kota yang memiliki tenaga yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan wabah dan bencana	35%	
			Jumlah kab/kota yang memiliki petugas terlatih dalam penanganan wabah dan bencana	25%	
			Jumlah kab/kota yang memiliki fasilitas sistem informasi penanganan wabah dan bencana	25%	
			Tercapainya persentase penanganan faktor resiko akibat kondisi Matra dan bencana	100%	
			Tercapainya Incidence Rate Kecacingan pada anak sekolah	14%	
			Tidak ditemukannya kasus Lyssa	0 kasus	
			Angka Penemuan kasus ISPA/Pneumonia di	90%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			balita		
			Tercapainya Micro filariasis rate	< 1%	
			Tercapainya Angka penemuan dan penanganan kasus diare	100%	
		7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Tercapainya persentase gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	
			Tercapainya persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	60%	
			Tercapainya cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium	91%	
			Tercapainya persentase anak 6-59 bulan mendapatkan Vitamin A	82%	
			Tercapainya persentase Ibu Hamil mendapatkan Fe	78%	
			Tercapainya persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	100%	
			Tercapainya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	75%	
			Tercapainya persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana	100%	
		8. Program Sumber Daya Kesehatan	Rasio dokter spesialis dengan penduduk	5,95	
			Rasio dokter dengan penduduk	31,45	
			Rasio dokter gigi dengan penduduk	20,98	
			Rasio bidan dengan penduduk	88,62	
			Rasio perawat dengan penduduk	107,30	
			Rasio apoteker dengan penduduk	7,24	
			Rasio sarjana kesmas dengan penduduk	27,73	
			Tersedianya satu orang bidan di setiap desa siaga	100%	
			Diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan	10 diklat/thn	
			Seluruh sarana pendidikan kesehatan ter-registrasi dan terstandarisasi	100%	
		9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Tercapainya persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan	100%	
			Tercapainya persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan	79%	
			Meningkatnya persentase alokasi pembiayaan kesehatan (diluar gaji pegawai) dari APBD	12.5%	
			Jumlah kebijakan dan pedoman, serta hukum kesehatan yang disosialisasikan	3 Peraturan/tahun	
			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	3 Dokumen	
			Jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan	3 Dokumen	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	7 Dok/Thn	
		10. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase kab/kota memiliki Profil Kesehatan Jumlah penelitian pembangunan kesehatan yang dilaksanakan	100% 3 Penelitian/ tahun	
4.	Peningkatan kualitas Infrastruktur mendukung pembangunan Ekonomi				
	01. Pekerjaan Umum	Irigasi			Dinas PSDA
		1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatnya persentase luas Irigasi dalam kondisi baik	76,4 %	
		1 Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan O & P Jaringan irigasi dan rawa	Terkendalinya Pelaksanaan O&P Irigasi yang efektif dan efisien.	1 Thn	
		2 Konsultasi dan TOT Aparatur O&P	Terkordinasinya Tata cara Pelaksanaan O&P Pengairan Prop. Sumatera Utara, Kab/Kota.	2 Keg.	
		3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (areal Irigasi : 1.000 ha – 3.000 ha dan Irigasi Lintas Kabupaten/Kota)	Jaringan irigasi yang terpelihara setiap tahun	88.725 Ha/Thn	
		4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa (areal Irigasi Rawa : 1.000 ha – 3.000 ha dan Irigasi Lintas Kabupaten/Kota)	Jaringan Rawa yang terpelihara setiap tahun	74.696 Ha/Thn	
		5 Pembinaan & Koordinasi Pemberdayaan P3A	Terkordinasinya pemberdayaan P3A dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif	1 Thn	
		6 Perlombaan P3A/GP3A/IP3A Tingkat Propinsi Sumatera Utara	Terpilainya P3A/GP3A/IP3A yang berprestasi pada Tingkat Propinsi Sumatera Utara setiap tahun	1 Kali	
		7 Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi (luasan 1.000 ha s/d 3.000 ha atau daerah lintas kabupaten/kota)	Areal irigasi yang efektif terlayani hasil kegiatan rehab, dan peningkatan	8.228 Ha	
		8 Rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur rawa (luasan 1.000 ha s/d 3.000 ha atau daerah lintas kabupaten/kota)	Areal Rawa yang efektif terlayani hasil kegiatan rehab, dan peningkatan	5.082 Ha	
		9 Capacity Building / Pendamping atau Penunjang Program-program WISMP atau Loan/Hibah	Terealisasinya Program Loan 4711-IND-WORD, dalam Pengelolaan SDA dan program loan/hibah	2 Komp/thn	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	K I N E R J A		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2 Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Meningkatnya penyediaan air baku	85%	
		1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Baku	Sarana dan prasarana air baku terpelihara	1 Thn	
		2 Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	Tersedia Sarana dan Prasarana Air Baku	4 Unit	
		3 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Meningkatnya Persentase panjang sungai yang mendapat konservasi (m)	70%	
		1 Kegiatan Wadah koordinasi sumber daya air provinsi sumatera utara	Kordinasi Pengelolaan SDA	1 Thn	
		2 Kegiatan Peringatan Hari Air, setiap tahun	Peringatan Hari Air	1 Kali	
		3 Kegiatan Komisi irigasi provinsi sumatera utara	Kordinasi Pengelolaan Irigasi	1 Thn	
		4 Pengelolaan Hidrologi / Hidrometri dan data/informasi sumber daya air	Ketersediaan data dan informasi sumber daya air.	1 Thn	
		5 Pengawasan dan penelitian pemberian rekomendasi teknis perijinan atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan sumber daya air	Rekomendasi perijinan dan Ketertiban Penggunaan Air Permukan	1 Thn	
		4 Program pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Persentase luas kawasan pengendalian banjir dan pengaman pantai yang dikelola	70%	
		1 Pembinaan dan pendayagunaan serta perencanaan pemeliharaan infrastruktur pengendali daya rusak air	Terkendalinya Pelaksanaan E&P Sungai yang efektif dan efisien	1 Thn	
		2 Exploitasi dan Pemeliharaan sungai dan bangunan sungai dan pantai	Terpeliharanya alur sungai dan bangunan pengendali daya rusak air dan banjir	10 WS/thn	
		3 Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Perk. Tebing, Normalisasi/Pelurusan Alur Sungai, dan Perbaikan/Pemb. Tanggul	42.653 m	
		4 Monitoring dan evaluasi kerusakan serta kegiatan satkorlak akibat bencana alam sumber daya air serta bahan banjir.	Mengurangi dampak akibat bencana alam yang terjadi melalui penanganan bencana alam dan siaga banjir	1 Thn	
		5 Program pembinaan, pengaturan dan perencanaan pengembangan sumber daya air	Persentase luas kawasan terbina	90%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	K I N E R J A		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1 Pembinaan dan perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah SKPD bidang sumber daya air.	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Air, (5 tahunan dan setiap tahun)	1 Thn	
		2 Pembinaan dan Perencanaan Tehnis Pengembangan dan Pembangunan sumber daya air (FS, Study, SID)	Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dan pembangunan sumber daya air (Study, Survey, Investigasi dan Desain)	5 Keg	
		3 Operasional untuk survey dan perencanaan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana SDA pada Wilayah Sungai	Operasional untuk survey dan perencanaan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana SDA pada Wilayah Sungai	10 UPT/Thn	
		4 Penataan ketatalaksanaan dan pemberdayaan pengelola sumberdaya air.	Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan SDA	2 Keg/Angk	
		5 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.	Ketersediaan data hasil pelaksanaan/ kinerja SKPD	1 Thn	
		Jalan dan Jembatan			Dinas PU Bina Marga
		1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	85%	
		1 Pembangunan Jalan	Kondisi Jalan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik	133.10 km	
		2 Penggantian Jembatan	Kondisi Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik	411.40 m	
		3 Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam	Kondisi Jalan dan Jembatan Bertambah Baik, Pelayanan Lalu lintas menjadi Lebih Baik		
		2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang mendapat pemeliharaan/rehab	95%	
		1 Pemeliharaan Berkala Jalan	Berkurangnya Jalan - jalan berlobang	41.68 Km	
		2 Pemeliharaan Rutin Jalan	Berkurangnya Jalan - jalan berlobang	2.807.20 km	
		3 Pemeliharaan Rutin Jembatan		16.516.50 m	
		3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang terbangun	70%	
		1 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya Mutu dan Kualitas Jalan dan Jembatan		
		2 Survey teknis jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya Mutu dan Kualitas Jalan dan Jembatan		
		3 Perencanaan teknis jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya Mutu dan Kualitas Jalan dan Jembatan		
		4 Pengawasan/supervisi jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya Mutu dan Kualitas Jalan dan Jembatan		

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan	Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya Mutu dan Kualitas Jalan dan Jembatan		
		6 Peningkatan data dan informasi jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya Mutu dan Kualitas Jalan dan Jembatan		
		7 Pembebasan tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas SDM, Meningkatnya Mutu dan Kualitas Jalan dan Jembatan		
		8 Pembebasan tanah untuk pembangunan KISM	Terbebaskannya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung KISM		
		9 Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan KEK Sei Mangkei	Terbangunnya sarana dan sarana pendukung KEK Sei Mangkei	
02.	<u>Perhubungan</u>	1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	70%	Dinas Perhubungan
		1 Pembangunan Dermaga ASDP	Terbangunnya dermaga ASDP sebanyak 3 dermaga	1 unit	
		2 Pembangunan Pos jaga Pelabuhan laut regional	Tersedianya fasilitas pengawasan pada pelabuhan laut regional (5 unit)	1 unit	
		3 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Regional	Tersedianya fasilitas perhubungan laut berupa speed boat (3 unit)	1 unit	
		4 Pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Laut Regional	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan laut (9 kegiatan)	2 Keg.	
		5 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang	Tersedianya fasilitas prasarana jembatan timbang 8 unit	2 unit	
		6 Pengadaan Fasilitas penunjang prasarana jembatan timbang	Tersedianya fasilitas penunjang operasional jembatan timbang (30 unit)	7 unit	
		7 Lanjutan Pembangunan Bandar Udara Labuhan Batu	Terbangunnya Bandara Baru di kawasan pantai timur	1 unit	
		2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang tersedia / direhab	65%	
		1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang	Terpeliharanya sarana dan prasarana jembatan timbang (5 kegiatan)	1 Keg.	
		2 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Perlengkapan Jalan (Rambu, Guardrail, Delineator, APILL, Marka Jalan)	Terpeliharanya sarana dan prasarana perlengkapan jalan (5 kegiatan)	1 Keg.	
		3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase prasarana perhubungan yang terpelihara/ direhab	60%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1 Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	meningkatnya disiplin dan ketertiban lalu lintas dan angkutan	1 Keg.	
		2 Pengamanan, pengendalian, penertiban dan pengawasan kegiatan lalu lintas angkutan jalan	terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan	1 Keg.	
		3 Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	terseleenggaranya kegiatan angkutan lebaran, natal dan tahun baru (10 kegiatan)	2 Keg.	
		4 Sosialisasi/ Penyuluhan Keselamatan Pelayaran	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masy. perlunya keselamatan pelayaran(3kegiatan).	1 Keg.	
		5 Biaya Operasional Ferry Roro di Kawasan Danau toba	Tersedianya Pelayanan Angkutan Danau di Kawasan Danau Toba	1 Keg.	
03.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara	76%	Dinas Pertambangan dan Energi
		1 Pembangunan PLTS di desa terpencil Sumut	Terpasangnya PLTS di desa terpencil di Sumut	1000 unit PLTS	
		2 Pembangunan PLTMH di desa terpencil Sumut	Terpasangnya PLTMH di desa terpencil di Sumut	2 unit PLTMH	
		3 Pembangunan Biogas di Sumatera Utara	Terpasangnya Fasilitas Konversi Biogas di Sumut	2 unit	
		2. Program peningkatan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi dan mineral	10%	
		1 Pembangunan PLTMH	Meningkatnya Elektrifikasi Sumatera Utara	85 %	
		2 Pembangunan PLTS	Meningkatnya ratio jumlah desa yang teraliri aliran listrik	85 %	
		3 Pembinaan usaha pertambangan rakyat	Berkurangnya kejadian pertambangan liar di Sumatera Utara	3 kasus	
		3. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya pengembangan di bidang kelistrikan		
		1 Penyajian data-data tentang Kondisi Geologi, Mineral dan kelistrikan	Meningkatnya akurasi data pembangunan sektor pertambangan dan energi	100%	
04.	Perumahan Rakyat	1. Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Rumah Layak Huni	10 %	Dinas Tarukim
		1 Pembangunan rumah sangat murah dan rumah murah	Terbanggunya rumah sangat murah dan rumah murah	5000 unit 33 Kab/Kota	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Revitalisasi Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/agribisnis				
01.	Ketahanan pangan	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.	Terpenuhinya kebutuhan pangan dan peningkatan diversifikasi pangan	33 Kab/kota	Badan Ketahanan Pangan
		1 Percepatan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan)	Jumlah Desa yang memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan tidur	5 Desa/kab/kota	
		2 Stabilisasi Harga Bahan Pangan melalui DPM-LUEP	Jumlah DPM-LUEP yang mendapat bantuan penyangga harga komoditi padi, jagung, cabe	100 DPM-LUEP	
		3 Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah lumbung desa yang terbangun	25 lumbung desa	
		4 Pemberdayaan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tunda Jual	Jumlah PUMK yang mendapat penguatan modal usaha kelompok (PUMK)	100 PUMK	
		5 Diversifikasi pangan melalui penggalan potensi pangan local berbasis sumber daya lokal	Mengurangi kebutuhan konsumsi beras	1,5%	
		6 Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan	6 Komoditi	
		7 Pengembangan industri pengolahan pangan lokal dan tepung-tepungan	Industri pangan lokal berbasis mocaf	10 unit	
		8 Penanganan daerah rentan pangan	Tertanganinya daerah rentan pangan	10 Kab/Kota	
		9 Sistem Informasi dan Akses Pangan	Tersedianya Informasi Harga Komoditi Strategis	100%	
02.	Penyuluh Pertanian, Perkebunan /Perikanan	1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian	33 Kab/kota	Bakorluh
		1 Pemberdayaan Pendamping Penyuluh	Jumlah pendamping penyuluh	150 orang	
		2 Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan	Jumlah peserta pelatihan penyuluh PUAP, THL TB PP	100 orang	
		3 Pengembangan Posluhtan Desa	Jumlah posluhtan terbangun	100 unit, 100 desa	
	Urusan Pilihan				
01.	Pertanian	1. Program peningkatan produksi pertanian	Meningkatnya produksi pangan	5%	Dinas Pertanian
		1 Peningkatan produksi menuju swasembada pangan	Jumlah produksi padi	3,901,761 ton	
		2 Pemanfaatan sumber benih/bibit unggul	Jumlah benih/bibit unggul	Padi Ton Jagung ton Kentang Ton Mangga Batang Durian Batang	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3 Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan jalan produksi dan irigasi)	Panjang jalan produksi terbangun dan irigasi desa yang terbangun/ terehabilitasi	Manggis Batang 2 km pada 3 Kecamatan pada 10 Kabupaten	
		4 Pengadaan pupuk non subsidi	Jumlah pupuk non bersubsidi (Urea, TSP, KCI dan NPK yang tersedia)	20 Ton	
		5 Pembangunan rumah kompos pada sentra produksi pertanian	Jumlah rumah kompos terbangun pada sentra produksi	3 unit pada 26 kabupaten	
		6 Pencetakan sawah baru	Meningkatnya luasan areal pertanaman padi	3500 Ha	
		2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya produktifitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi	5%	
		1 Pengadaan bibit/benih unggul	Meningkatnya ketersediaan bibit unggul	10%	
		3. Program Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya produktifitas komoditi unggulan pada kawasan agropolitan untuk pengembangan agribisnis	3%	
		1 Pengembangan program Agropolitan dan Agromarinepolitan	Meningkatnya produksi komoditi unggulan pada lokalita percontohan	5%	
	Perkebunan	4 Program peningkatan produksi perkebunan	Meningkatnya hasil produksi tanaman perkebunan	3%	Dinas Perkebunan
		1 Peremajaan tanaman perkebunan rakyat	Luas areal tanaman perkebunan tidak menghasilkan (TTM) yang diremajakan	20.000 Ha	
		2 Pemberantasan hama/penyakit pada tanaman perkebunan	Menurunnya serangan hama/penyakit	26 Kabupaten	
		3 Pengembangan tanaman tebu dan aren dalam upaya swasembada gula	Persentase luas tanaman areal penanaman tebu dan aren yang baru	15%	
		4 Penyediaan pupuk non subsidi bagi perkebunan rakyat	Jumlah pupuk non bersubsidi (Urea, TSP, KCI dan NPK) yang tersedia	25 Ton	
		5 Penumbuhan penangkar bibit	Tersedianya bibit karet, kakao, kopi	5000 batang	
		6 Pembangunan/peningkatan jalan produksi	Panjang jalan produksi terbangun	2 km pada 3 Kecamatan pada 10 Kabupaten	
		6 Program peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Meningkatnya kualitas hasil produksi Perkebunan	3%	
		1 Peningkatan mekanisasi perkebunan	Mekanisasi Alat-alat Perkebunan	-Mesin Babat 1.500 Unit; Power sprayer 500 Unit, Hand sprayer 1.000 Unit, Alat sadap karet 5000 unit.	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7 Program Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya hasil Pemasaran Perkebunan	Alat dodos sawit 1000 unit 3%	
		1 Penguatan kelembagaan petani dengan pengembangan system agribisnis	Jumlah Kelompok Tani/Gapoktan yang terbina	1 kelompok tani per kabupaten	
		2 Program Pengembangan kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan			
		3 Pengembangan komoditi Unggulan Agropolitan/Agromarinepolitan Perkebunan	Jumlah lokalita percontohan yang mendapat pembinaan dan Pengembangan Komoditi unggulan	Agropolitan : 9 Kab/Kota Agromarinepolitan : 24 Kab/Kota	
		3 Fasilitasi dan koordinasi unuk mendukung pengembangan kawasan industri Sei Mangkei	Terbangunnya sarana dan prasarana penunjang pada kawasan industri Sei Mangkei	1 Kegiatan	
	Peternakan	8. Program peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan melalui peningkatan sumber daya manusia peternakan	4,13 %	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan
		1 Peningkatan SDM petugas teknis peternakan	Bertambahnya jumlah inseminator terlatih Terlatihnya jumlah petugas kesehatan masyarakat veteriner Terlatihnya petugas kesehatan hewan Terlatihnya petugas informasi pasar Terlatihnya petugas data peternakan Meningkatnya sdm IB Meningkatnya sdm petugas bibit	30 org 33 org 33 Org 20 org 33 org 33 Org 33 org 33 org	
		2 Peningkatan SDM peternak	Tersosialisasikannya program SMD Meningkatnya SDM calon penerima SMD Terbinanya kelompok penerima LM 3 Terbinanya keompok penerima bantuan sosial Telatihnya sdm peternak dalam pengolah pakan ternak	150 Org 80 Org 20 Kelompok 50 kelompok 30 org	
		3 Pembinaan kelembagaan peternakan	Terlatihnya usaha kelompok budidaya ternak	50 Kel	
		9. Program Peningkatan Produksi Peternakan	Pelatihan kelompok sapi perah Meningkatnya produksi daging, telur dan susu	50 org Daging 4,13 % Telur 4,02 % dan Susu 5 %	
		1 Meningkatkan Populasi Ternak dalam rangka pencapaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau	Populasi sapi meningkat Populasi kerbau meningkat Penyediaan daging sapi Potensial stok sapi local	5 % 1,8 % 15.174 ton 77.415 ekor	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2 Pemberantasan penyakit ternak	Jumlah vaksin rabies Jumlah vaksin SE Jumlah vaksin HG Bertambahnya dokter hewan Bertambahnya paramedic Bertambahnya jumlah vaksinator Angka kesakitan hewan Angka kematian hewan Antraks	30 org 290.000 dosis 70.000 dosis 70.000 dosis 10 org 10 org 10 org 5 % 5 % Bebas	
		3 Pembangunan balai inseminasi buatan daerah	Jumlah balai inseminasi buatan yang terbangun	1 unit	
		4 Pengembangan integrasi ternak dengan perkebunan	Jumlah kabupaten / kota yang melakukan integrasi ternak dengan perkebunan dan kehutanan	10 Kab	
		5 Penyelamatan sapi / kerbau betina produktif	Jumlah ternak sapi / kerbau betina produktif yang terjaring	150 ekor	
		6 Peningkatan kinerja BIBD	Jumlah akseptor meningkat 5 % Produksi BIBD meningkat 20 % Tingkat kelahiran meningkat 10 %	56.000 ekor 50.000 dosis 37.500 ekor	
		10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Promosi dan pameran produk hasil ternak	17 pameran	
		1 Pengolahan Kelompok usaha pengolahan	Kelompok usaha pengolahan yang difasilitasi bertambah	20 Kelompok	
		2 Fasilitasi pasar hewan	Jumlah pasar hewan yang dapat difasilitasi	2 Unit	
		11. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi	Meningkatnya produksi peternakan melalui penerapan teknologi peternakan	Daging 4,13 % Telur 4,02 % Susu 5 %	
		1 Penyediaan bibit (semen beku) yang berkualitas melalui BIBD	Tersedianya bibit sapi, kerbau	50.000 dosis	
		2 Penyediaan bibit kambing boerka melalui kerjasama dengan balai penelitian ternak kambing sei putih	Tersedianya bibit kambing boerka	500 dosis 200 ekor	
		3 Penyediaan fasilitas alsin pengolahan pakan	Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak bagi usaha kelompok	50 kelompok	
		12 Program Pengembangan Agribisnis	Berkembangnya agribisnis peternakan		
		1 Pengembangan kawasan agropolitan	Berkembangnya usaha peternakan di kawasan agropolitan	9 kab/kota	
		2 Pengembangan kawasan agromarinepolitik	Berkembangnya usaha peternakan di kawasan agromarinepolitik	16 Kab/kota	
		3 Pengembangan kluster peternakan	Berkembangnya kluster peternakan	5 Kab/kota	
02.	Kehutanan	1 Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase luas hutan yang direhabilitasi	25%	Dinas Kehutanan
		1 Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Illegal logging, kebakaran	Jumlah polisi hutan (jagawana) yang dilatih	100 orang	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan perambahan hutan)			
		2 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pantai	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	500 Ha, 3 Kabupaten	
		3 Rehabilitasi dan Pengembangan Tahura Bukit Barisan	Luas hutan Tahura Bukit Barisan yang direhabilitasi	500 Ha	
		2 Program perencanaan dan pengembangan hutan	Meningkatnya pemahaman fungsi hutan	5 Kabupaten	
		1 Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kehutanan	Jumlah peserta sosialisasi UU Bidang Kehutanan	100 peserta	
		3 Program pemanfaatan kawasan hutan produksi	Meningkatnya pemanfaatan hutan produksi	Kontribusi sektor kehutanan meningkat 10%	
		1 Pemantapan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Dokumen survey identifikasi potensi Sumber Daya Hutan di Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen penelitian	
		2 Optimalisasi penerimaan dari sektor Kehutanan	Jumlah stasiun pengamatan hutan	20 Stasiun pengamat	
		3 Pemanfaatan hutan sebagai sumber penghasilan masyarakat	Jumlah kelompok tani yang menerapkan agroforestry (integrasi dengan ternak)	50 kelompok tani, 500 ekor bibit ternak	
03.	Kelautan dan Perikanan	1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	10%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		1 Pengadaan Kapal 50 GT dalam rangka peningkatan produksi (di pantai barat)	Jumlah Kapal Penangkap ikan 50 GT yang tersedia	3 unit di Pantai Barat	
		2 Pembangunan dan pengelolaan Tempat pelelangan Ikan	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terbangun	2 unit di Pantai Barat 3 unit di Pantai Timur	
		3 Pengadaan alat penangkapan ikan, jaring, cool box dan rumpon di Kab/Kota (pantai barat dan pantai timur)	Jumlah alat penangkapan ikan (jaring, cool box dan rumpon) yang tersedia	- Jaring : 100 unit - Cool box : 50 unit - Rumpon : 50 unit	
		4 Pengembangan produksi Perikanan Budidaya untuk ekspor dan konsumsi dalam negeri di kawasan budidaya air tawar, air payau/tambak dan air laut	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat pelatihan budidaya perikanan	- 5 Kelompok Nelayan tiap kabupaten di Pantai Barat dan Pantai Timur	
		5 Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana budidaya melalui pengadaan calon induk unggul dan pengadaan mesin pellet skala rumah tangga	Jumlah bibit ikan yang tersedia	Bibit ikan mas : 100.000 ekor, ikan lele : 100.000 ekor, ikan gurame : 50.000 ekor	
			Jumlah mesin pellet skala rumah tangga yang	Mesin pellet : 25 unit	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	tersedia Meningkatnya wawasan budaya kelautan dan maritim di Provinsi Sumatera Utara	3 Kabupaten	
		1 Rehabilitasi hutan mangrove dan terumbu karang di wilayah pesisir Sumatera Utara (pantai barat dan pantai timur)	Luas lahan hutan mangrove dan terumbu karang yang terehabilitasi	500 Ha, 3 Kabupaten	
		2 Identifikasi potensi dan pemetaan pulau di Sumatera Utara	Jumlah Dokumen hasil penelitian	1 dokumen penelitian	
		3. Program pengembangan agribisnis	Berkembangnya agribisnis perikanan laut dan budidaya	3 Kabupaten	
		1 Pengembangan kluster industri pengolahan hasil perikanan	Jumlah lokasi kluster industri pengolahan hasil perikanan	1 Kabupaten/Kota di Pantai Barat dan 2 Kab di Pantai Timur	
		2 Revitalisasi UPT Perikanan menjadi rujukan bagi masyarakat	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat pelatihan	50 Kelompok nelayan	
		4. Program pengembangan kawasan agromarinepolitan dan pulau-pulau terluar	Meningkatnya pendapatan nelayan di Sumatera Utara	70% dari target	
		1 Mendukung program Agromarinepolitan dan pulau-pulau terluar di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah lokalita yang terbina	26 Kabupaten/ Kota	
6.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah				
01.	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	1 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	1 Kegiatan	Dinas Koperasi dan UMKM
		1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang Aktif dan Produktifitasnya yang diukur dari Sisa Hasil Usaha (SHU)	Naik 10%	
		2 Pembentukan Koperasi Primer	Jumlah Koperasi Primer yang Terbentuk	10 unit	
		2 Program pengembangan kewirausaha dan keunggulan kompetitif UKM	Meningkatnya peran UMKM di Provinsi Sumatera Utara	1 Kegiatan	
		1 Pemberdayaan usaha Mikro dan Menengah	Jumlah UMKM yang tumbuh di Sumatera Utara	10%	
		2 Pelatihan-Pelatihan UMKM untuk mendukung produktifitas	Jumlah Peserta UMKM yang ikut pelatihan	500 peserta	
		3 Peningkatan peran UMKM dalam struktur pasar domestik	Pangsa pasar produk UMKM dalam pasar Sumut Meningkat	5%	
		4 Pembangunan Rumah Produktifitas Daerah	Tumbuhnya Wira Usaha Baru	1000 orang	
		3 Program pemberdayaan usaha skala	Terbentuknya BLUD di Provinsi Sumatera Utara	1 Kegiatan	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		mikro 1 Pembentukan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dalam upaya untuk mengakomodir penyaluran Modal Bergulir	Jumlah BLUD yang terbentuk pada Kab/Kota	1 BLUD	
02.	Pariwisata	1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pembangunan Destinasi Manajemen Objek (DMO) Pariwisata 2 Penataan kawasan situs wisata budaya di Sumatera Utara 3 Penataan kawasan objek Wisata unggulan Sumatera Utara	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata utama Danau Toba Jumlah Wisatawan yang mengunjungi situs budaya Sumatera Utara Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata unggulan Sumatera Utara	12 % 10% 15% 15%	Dinas Parnesibud
		2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Pembangunan Tourism Information Centre (TIC) Terpadu 2 Penyelenggaraan Event NIAS SAIL 2013	Meningkatnya jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara Meningkatnya jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara Meningkatnya kunjungan Wisata ke Kepulauan Nias	12% 12% 10%	
03.	Perdagangan	1 Program pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen 1 Memperlancar arus distribusi barang 2 Pengawasan terhadap barang beredar	Stabilitas harga bahan pokok makanan Inflasi yang rendah Keamanan dan Hygenis makanan terjamin dan juga menghindari barang yang tidak lolos uji mutu	33 Kab/Kota 6,0% Jumlah makanan kadaluarsa berkurang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2 Program pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen 1 Memfasilitasi pemberian HAKI kepada produk-produk baik tangible maupun intangible	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen Jumlah Produk-produk Sumatera Utara telah memiliki Hak Paten	33 Kab/Kota 5 produk	
04.	Industri	1 Program Penataan Struktur Industri 1 Peningkatan nilai tambah produktifitas industri kecil	Meningkatnya kontribusi Industri kecil terhadap PDRB Sumatera Utara Kontribusi Industri kecil dalam PDRB meningkat	0,7% 0,7%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.	Perluasan kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin	1 Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran 1 PNPM Pedesaan 2 PNPM Perkotaan 3 PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan 7,00 % Pengangguran 6,60 % 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 33 Kab/Kota	Bapemas Disnakertrans

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Peningkatan program kluster 1, 2, 3 dan 4 dan alokasi APBD Prov dan Kab/kota		33 Kab/Kota	
		3. Pemberdayaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota		33 Kab/Kota	
		4. Menciptakan kawasan ekonomi baru sebagai penyedia lapangan pekerjaan		33 Kab/Kota	
		5. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat melalui BLK		33 Kab/Kota	
8.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi				
1.	Pilar-1 : Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Program Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) (%) 2. Persentase Balita Usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%) 3. Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%) 4. Persentase Ibu Hamil yang mendapat 90 tablet (%) 5. Cakupan Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium (%) 6. Persentase Balita Gizi Buruk Ditangani (%)	80 83 55 80 90 100	Koordinator Dinas Kesehatan
		1. Penemuan dan penanggulangan penderita kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya dan Pemberian Dana Perawatan Kasus 2. Pelatihan Konselor ASI 3. Penyuluhan IMD di Desa 4. Workshop Vitamin A 5. Bulan Sweeping Vitamin A 6. Pelatihan Surveilans Gizi 7. Penyediaan MP-ASI Buffer Stock 8. Pertemuan MP-ASI Dalam Rangka Pananggulangan Bencana 9. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Petugas Puskesmas 10. Pelatihan kader Posyandu 11. Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan BOK untuk peningkatan Posyandu 12. Pertemuan Sosialisasi Kel.Pendukung ASI bagi Petugas Puskesmas 13. Penyebaran Informasi Melalui		33 Kab/Kota	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Radio, Poster dll			
		2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak			
		1. Penyediaan Tablet Besi			
		2. Monitoring Tablet besi ke Kabupaten/kota			
		3. Penyediaan PMT Bumil			
		4. Penyediaan Kapsul Vitamin A			
		5. Monitoring Pemberian Kapsul Vitamin A			
		6. Evaluasi PWS Ibu Hamil			
		7. Home Visit oleh Bidan Desa			
		8. Pelayanan kesehatan Anak			
		9. Pemberian Imunisasi/Suntikan K1			
2.	Pilar-2 : Peningkatan Aksesibilitas Pangan	3. Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi per-kapita/ hari minimal 2.200 K.kal (K.Kal)	3852	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Badan Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian - Dinas Peternakan - Dinas Kelautan dan Perikanan
			2. Ketersediaan protein minimal per kapita/hari sebesar 57 gr/kapita/hari (Gr)	80.52	
			3. Tersedianya cadangan pangan pemerintah di tingkat Kabupaten/kota minimal 100 ton ekuivalen beras dan ditingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras (Ton)	300	
			4. Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah dan atau lumbung pangan pada setiap provinsi dan kabupaten (Lembaga)	25	
			5. Wilayah rawan pangan yang tertangani (desa)	415	
			6. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans pangan dan gizi (SKPG) (%)	100	
			7. Tersedia Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) (Kab)	25	
			8. Jumlah Desa Mandiri Pangan (Desa)	145	
		1. Pembinaan Desa Mandiri Pangan		33 Kab/Kota	
		2. Gerakan Mandiri Pangan			
		3. Monev Kemandirian Pangan			
		4. Pemberdayaan Gemapan melalui lumbung pangan dan PMUK			
		5. Pembinaan Manajemen Lumbung Pangan desa			

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Pengembangan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)			
		7. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi			
		4. Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan	1. Lembaga distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di daerah produsen Pangan	17	
		1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)		33 Kab/Kota	
		2. Analisis Dan Pola Distribusi Pangan			
		3. Pengembangan Panel Harga dan Pasokan Pangan di tingkat konsumen dan produsen			
		5. Pengembangan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	1. Menurunnya konsumsi beras 1,5% per tahun (Kg/Kap/Thn)	130,78	
			2. Meningkatnya skor PPH wilayah tiap tahun	93.0	
		1. Pemanfaatan Pekarangan		33 Kab/Kota	
		2. Pengolahan Tepung-tepungan			
		3. Pembuatan poster/leaflet/ baliho dan Pemutaran Film Dokumenter			
		4. Pengawasan, peredaran mutu buah dan sayuran serta uji lab. Residu pestisida			
		5. pemantauan penanganan keamanan pangan buah dan sayuran oleh kabupaten/kota			
		6. operasional OKKPD Provinsi			
		7. pengawasan dan monitoring mutu hasil pertanian			
3.	Pilar -3 : Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	6. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota (District Food Inspector)	1. Jumlah Tenaga penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota (District Food Inspector)	33 Kab/Kota	- Koordinator Balai POM - Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
		1. Pelatihan Training of Trainer (TOT) terhadap Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota			
		7. Bimbingan Teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1. Jumlah IRTP yang dilatih dan difasilitasi Disain dan Implementasi Cara Produksi Produk Pangan yang baik (CPPB) pada Industri Rumah Tangga	150	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2. Monitoring dan Verifikasi Penerapan CPPB pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) (Kegiatan)	10	
		1. Pelatihan dan Fasilitasi Disain dan Implementasi Cara Produksi Produk Pangan yang Baik			
		2. Audit surveilan pada Kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara			
		8. Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah	1. Jumlah Kantin Sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan kantin sekolah (Kantin)	100	
			2. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Prinsip-prinsip keamanan pangan pada kantin sekolah (Jumlah Kantin)	100	
			3. Pengawasan jajanan Anak Sekolah (PJAS)	1000	
		1. Penelitian dan pengawasan Jajanan Anak Sekolah			
		2. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Bimtek pada Kantin Sekolah			
4.	Pilar-4 : Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS)	9. Pembinaan PHBS Pangan dan Gizi	1. Persentase persalinan ditolong oleh nakes (%)	90	- Koordinator Dinas Pendidikan
			2. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih (%)	75	- Dinas Kesehatan
			3. Persentase rumah tangga dengan akses terhadap jamban keluarga. (%)	70	
			4. Persentase rumah tangga yang ber PHBS (%)	65	
		1. Workshop usaha kesehatan sekolah (UKS) bagi siswa SMA, SMK, SMP, SD Negeri dan Swasta		33 Kab/Kota	
		2. Pemberian Makanan tambahan anak sekolah			
5.	Pilar-5 : Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	10. Peningkatan Kelembagaan Pangan dan Gizi di Daerah	1. Tersedianya kelembagaan pangan di daerah (Kab)	33	- Koordinator Dinas Pertanian
			2. Jumlah Tenaga Kesehatan Gizi di Puskesmas D1-D3 (Orang)	72	- Badan Ketahanan Pangan
			3. Jumlah kecamatan yang mempunyai Tenaga PPL Pertanian yang mengikuti Pelatihan Pangan dan Gizi (Kecamatan)	66	- Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
			4. Tersedianya data tingkat konsumsi energi dan protein	2 kab/kot	
			5. Tersusunnya program pangan dan gizi pada RPJMD	100	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan	KINERJA		SKPD
			Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Indikator Kegiatan (Output)	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Revitalisasi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten/kota dan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD		33 Kab/Kota	
		2. Pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan dan Gizi			
		3. Revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi di pedesaan			